

LAPORAN KINERJA

INTERIM

TRIWULAN II 2025

BALAI POM DI BOGOR



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025



Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Balai POM di Bogor dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor Interim Triwulan II Tahun 2025 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra Balai POM di Bogor Tahun 2025-2029, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja terhadap target triwulan II tahun 2025, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor pada periode selanjutnya.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja

Bogor, 20 Juli 2025
Kepala Balai POM di Bogor,



 Jeffeta Pradeko Putra, S.Farm., M.Si 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR vii

IKHTISAR EKSEKUTIF viii

BAB 1 PENDAHULUAN..... 1

1.1 LATAR BELAKANG..... 1

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI..... 1

1.3 STRUKTUR ORGANISASI..... 3

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI..... 4

1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS..... 4

1.5.1 INTERNAL..... 4

1.5.2 EKSTERNAL 6

1.5 ISU STRATEGIS 7

Isu Strategis yang mempengaruhi kinerja Balai POM di Bogor dikaji melalui Renstra 2025-2029 Balai POM di Bogor dibagi menjadi 2 yaitu, internal dan eksternal:..... 7

1.5.1 Internal 7

1.5.2 Eksternal..... 8

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA..... 14

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS 14

2.1.1 VISI..... 15

2.1.2 MISI..... 16

2.2 SASARAN KEGIATAN..... 16

2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)..... 19

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 21

2.5 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BOGOR TAHUN 2025..... 23

2.6 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR 25

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 27

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..... 27

3.1.1 SASARAN KEGIATAN KE-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT 30

3.1.3 SASARAN KEGIATAN KE-3: Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 58

3.1.4 SASARAN KEGIATAN KE-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT 61

3.1.5 SASARAN KEGIATAN KE-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT 74

3.1.6 SASARAN KEGIATAN KE-6: Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal 79

3.1.7 SASARAN KEGIATAN KE-7: Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal 82

3.1.8 SASARAN KEGIATAN KE-8 : Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan 85

3.1.9 SASARAN KEGIATAN KE-9 : Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel..... 86

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA 94

3.3 REALISASI ANGGARAN 97

BAB 4 PENUTUP 98

4.1 KESIMPULAN 98

4.2 SARAN..... 99

LAMPIRAN 100

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Bogor Tahun 2025 19

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Balai POM di Bogor Tahun 2025 21

Tabel 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Bogor Tahun 2025..... 23

Tabel 4 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN 2025 27

**Tabel 5 PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN II TAHUN 2025..... 28**

Tabel 6 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-1 Triwulan II TAHUN 2025 30

**Tabel 7 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI
BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN” TRIWULAN II TAHUN 2025
..... 31**

**Tabel 8 Perbandingan Realisasi “Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang
Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan” triwulan II tahun 2025..... 32**

**Tabel 9 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko
Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan” triwulan II tahun 2025..... 33**

**Tabel 10 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah
melaporkan KTD/ESO” TW II TAHUN 2025 34**

**Tabel 11 Perbandingan Realisasi “Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan
KTD/ESO” triwulan II tahun 2025 35**

**Tabel 12 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang
ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN II TAHUN 2025..... 36**

**Tabel 13 Perbandingan Realisasi “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti
sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025..... 36**

**Tabel 14 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Persentase sampel Pangan Olahan berisiko
yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025..... 37**

**Tabel 15 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR Persentase sampel KLB keracunan pangan yang
diuji sesuai standar TRIWULAN II TAHUN 2025 38**

**Tabel 16 Perbandingan Realisasi “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti
sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025..... 39**

**Tabel 17 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya “Persentase sampel KLB keracunan pangan
yang diuji sesuai standar” triwulan II tahun 2025 40**

**Tabel 18 Perbandingan Realisasi “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai
ketentuan” triwulan II tahun 2025..... 40**

**Tabel 19 Perbandingan Realisasi “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai
ketentuan” triwulan II tahun 2025..... 41**

**Tabel 20 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Persentase sampel PIRT berisiko yang
ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025..... 42**

Tabel 21 Perbandingan Realisasi “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder” triwulan II tahun 2025.....	43
Tabel 22 Perbandingan Realisasi “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder” triwulan II tahun 2025.....	44
Tabel 23 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder” triwulan II tahun 2025	44
Tabel 24 Perbandingan Realisasi “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025.....	45
Tabel 25 Perbandingan Realisasi “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025.....	46
Tabel 26 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025	47
Tabel 27 Perbandingan Realisasi “Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025	47
Tabel 28 Perbandingan Realisasi “Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025.....	48
Tabel 29 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025	49
Tabel 30 Perbandingan Realisasi “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025	50
Tabel 31 Perbandingan Realisasi “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025	51
Tabel 32 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025	51
Tabel 33 Perbandingan Realisasi “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025.....	52
Tabel 34 Perbandingan Realisasi “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025.....	53
Tabel 35 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025	53
Tabel 36 Perbandingan Realisasi “Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025.....	54
Tabel 37 Perbandingan Realisasi “Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025.....	55
Tabel 38 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025	56
Tabel 39 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-2 TRIWULAN II TAHUN 2025	56
Tabel 40 Perbandingan Realisasi “Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025.....	57
Tabel 41 Perbandingan Realisasi “Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025	58
Tabel 42 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-3 TRIWULAN II TAHUN 2025	59
Tabel 43 Perbandingan Realisasi “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium” triwulan II tahun 2025.....	60
Tabel 44 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-4 TRIWULAN II TAHUN 2025.....	62
Tabel 45 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” TRIWULAN II TAHUN 2025	63
Tabel 46 Perbandingan Realisasi “Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” triwulan II tahun 2025	64
Tabel 47 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” triwulan II tahun 2025	66
Tabel 48 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan” TRIWULAN II TAHUN 2025	67
Tabel 49 Perbandingan Realisasi “Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan” triwulan II tahun 2025	68

Tabel 50 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan” triwulan II tahun 2025	68
Tabel 51 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Jumlah Desa Pangan Aman” TRIWULAN II TAHUN 2025	69
Tabel 52 Perbandingan Realisasi “Jumlah Desa Pangan Aman” triwulan II tahun 2025.....	70
Tabel 53 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Jumlah Desa Pangan Aman” triwulan II tahun 2025	71
Tabel 54 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas” TRIWULAN II TAHUN 2025.....	72
Tabel 55 Perbandingan Realisasi “Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas” triwulan II tahun 2025	72
Tabel 56 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas” triwulan II tahun 2025.....	73
Tabel 57 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-5 TRIWULAN II TAHUN 2025.....	74
Tabel 58 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan” TRIWULAN II Tahun 2025.....	77
Tabel 59 Perbandingan Realisasi “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan” triwulan II tahun 2025.....	77
Tabel 60 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan” triwulan II tahun 2025.....	78
Tabel 61 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-6 TRIWULAN II TAHUN 2025.....	79
Tabel 62 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT” Triwulan II Tahun 2025	80
Tabel 63 Perbandingan Realisasi “Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT” triwulan II tahun 2025.....	81
Tabel 64 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT” triwulan II tahun 2025	81
Tabel 65 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-7 Triwulan II Tahun 2025.....	82
Tabel 66 Perbandingan Realisasi “Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT” triwulan II tahun 2025.....	83
Tabel 67 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar” triwulan II tahun 2025 ..	84
Tabel 68 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-8 Triwulan II Tahun 2025.....	85
Tabel 69 Perbandingan Realisasi “Indeks Pelayanan Publik UPT” triwulan II tahun 2025	86
Tabel 70 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-9 TRIWULAN II TAHUN 2025.....	86
Tabel 71 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM” TRIWULAN II TAHUN 2025	88
Tabel 72 Perbandingan Realisasi “Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM” triwulan II tahun 2025 ...	88
Tabel 73 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Nilai AKIP UPT” TRIWULAN II TAHUN 2025 ..	90
Tabel 74 Perbandingan Realisasi “Nilai AKIP UPT” triwulan II tahun 2025.....	91
Tabel 75 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM” TRIWULAN II TAHUN 2025	92
Tabel 76 Perbandingan Realisasi “Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM” triwulan II tahun 2025 .	92
Tabel 77 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM” TRIWULAN II TAHUN 2025.....	93
Tabel 78 Perbandingan Realisasi “Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM” triwulan II tahun 2025	94
Tabel 79 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2025	95
Tabel 80 RINCIAN REALISASI ANGGARAN BALAI POM DI BOGOR TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Balai POM di Bogor Tahun 2025 3

Gambar 2 Data Pegawai Balai POM di Bogor berdasarkan Tahun 2025 5

Gambar 3 Wilayah Kerja Balai POM di Bogor 6

Gambar 4 Jumlah Sarana Produksi di wilayah kerja Balai POM di Bogor 7

Gambar 5 Jumlah Sarana Distribusi di wilayah kerja Balai POM di Bogor 7

Gambar 6 Misi Balai POM di Bogor 16

Gambar 7 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja 26

Gambar 8 Kategori Nilai Indeks Pelayanan Publik 85

Gambar 9 Rincian Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2025 97

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai POM di Bogor Interim Triwulan II Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Balai POM di Bogor tahun 2025-2029 yang terdiri dari 10 sasaran strategis dengan 26 indikator kinerja utama. Dari 10 sasaran strategis, diperoleh 1 sasaran strategis memperoleh capaian “**Baik**”, 4 sasaran strategis memperoleh capaian “**Sangat Baik**”, 2 sasaran strategis dengan capaian “**Tidak Dapat Disimpulkan**”, dan 3 sasaran strategis baru dilakukan penilaian di akhir tahun.

Pernyataan pencapaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Pada triwulan II tahun 2025 Balai POM di Bogor berhasil Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Bogor dengan NPS sebesar 110,08% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.
2. Pada triwulan II tahun 2025 Balai POM di Bogor berhasil Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di wilayah kerja Balai POM di Bogor dengan NPS sebesar 200% dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”.
3. Pada triwulan II tahun 2025 Balai POM di Bogor berhasil Mewujudkan Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Bogor dengan NPS sebesar 117,14 % dengan kriteria “**Sangat Baik**”.
4. Pada triwulan II tahun 2025 Balai POM di Bogor berhasil Meningkatkan Efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Bogor dengan NPS sebesar 136,44% dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”
5. Pada triwulan II tahun 2025 Balai POM di Bogor berhasil Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan NPS sebesar 104,18% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.
6. Pada triwulan II tahun 2025 Balai POM di Bogor berhasil mewujudkan Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Bogor dengan NPS sebesar 102,27% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.
7. Pada triwulan II tahun 2025 Balai POM di Bogor berhasil mewujudkan Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Bogor dengan NPS sebesar 100% dengan kriteria “**Baik**”.
8. Indikator Kinerja Layanan Publik UPT yang prima baru dilakukan penilaian di akhir tahun.
9. Indikator Kinerja Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal baru dilakukan penilaian di akhir tahun.
10. Indikator Kinerja Meningkatnya kepuasan masyarakat dan pelaku usaha pengguna layanan atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik BPOM baru dilakukan penilaian di akhir tahun.

Persentase capaian target sasaran strategis Balai POM di Bogor pada triwulan II tahun 2025 antara 100% sampai dengan 200%. Capaian sasaran strategis paling rendah diantara indikator lainnya yaitu pada indikator “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Bogor”. Sedangkan capaian sasaran strategis tertinggi daripada indikator lainnya yaitu pada indikator “Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di wilayah kerja Balai POM di Bogor” sebesar 200%.

Pada triwulan II tahun 2025, anggaran Balai POM di Bogor sebesar Rp.9,925,362,000 (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 3,144,121,187 (Tiga Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) sehingga persentase capaian realisasi sebesar 31,68%.

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Balai POM di Bogor untuk dapat memperlihatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya

Bogor, 20 Juli 2025

Kepala Balai POM di Bogor

Jeffeta Pradeko Putra, S.Farm., M.Si 

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Interim Balai POM di Bogor Triwulan II Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Triwulan II Tahun 2025 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Laporan Kinerja Interim ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Balai POM di Bogor. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke ini menghadapi berbagai tantangan, antara lain : 1) aspek kesehatan-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) aspek sosial-meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) aspek ekonomi-mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi Obat dan Makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan Obat dan Makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran produk ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan Obat dan Makanan; 4) aspek keamanan nasional meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme; dan 5) aspek teknologi-meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran Obat dan Makanan daring di era Revolusi Industri 4.0

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Badan POM terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan

Makanan.

Berdasarkan dari peraturan tersebut dan upaya efektivitas pengawasan obat dan makanan maka dibuatlah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan tersebut merupakan dasar dari terbentuknya Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan BPOM yang tersebar di wilayah Indonesia.

UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM; b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Payung hukum pembentukan Balai POM di Bogor berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai POM di Bogor memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai POM beralamat Jl. Raya Bogor No. 27 B, Nanggewer, Cibinong, Kab. Bogor dengan wilayah kerja Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Selain itu Balai POM di Bogor juga memiliki Laboratorium di Gedung II yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No 40 Cibinong Bogor.

KEDUDUKAN

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor merupakan UPT BPOM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

TUGAS

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Balai POM di Bogor sebagai UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

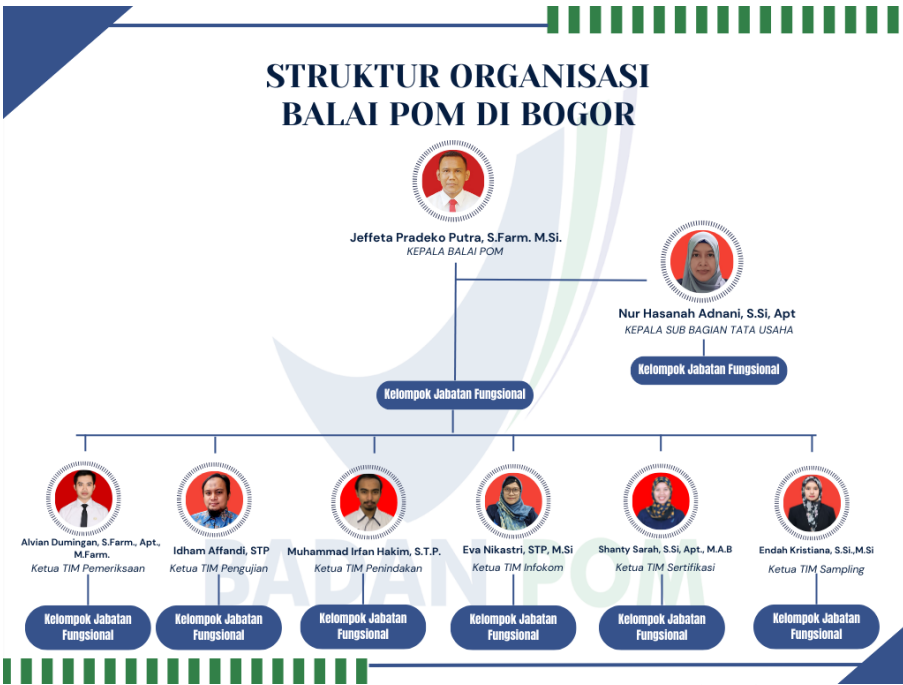
FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai POM di Bogor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;

- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1 Struktur Organisasi Balai POM di Bogor Tahun 2025

Struktur Organisasi Balai POM di Bogor berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 adalah Kepala Balai POM langsung membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Ketua Tim Kerja dan kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional tersebut masing-masing melaksanakan fungsi Informasi dan Komunikasi, Pemeriksaan dan Sertifikasi, Pengujian, Penindakan dan Tata Usaha.

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sasaran strategis Balai POM di Bogor disusun berdasarkan visi, misi dan sasaran strategis yang sesuai Rencana Strategis Tahun 2025-2029 (Renstra Tahun 2025-2029) Balai POM di Bogor. Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 tersebut diharapkan Balai POM di Bogor akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- b. Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang bermutu
- d. Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- e. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- f. Layanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- g. Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif

Terkait dengan peta strategi tersebut, Balai POM di Bogor sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM mempunyai peran strategis dalam pencapaian outcome tersebut di atas, utamanya dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok. Mengingat luasnya wilayah kerja dengan SDM yang masih kurang berdasarkan analisis beban kerja, Balai POM di Bogor berusaha melaksanakan fungsi dengan maksimal.

1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1.5.1 INTERNAL

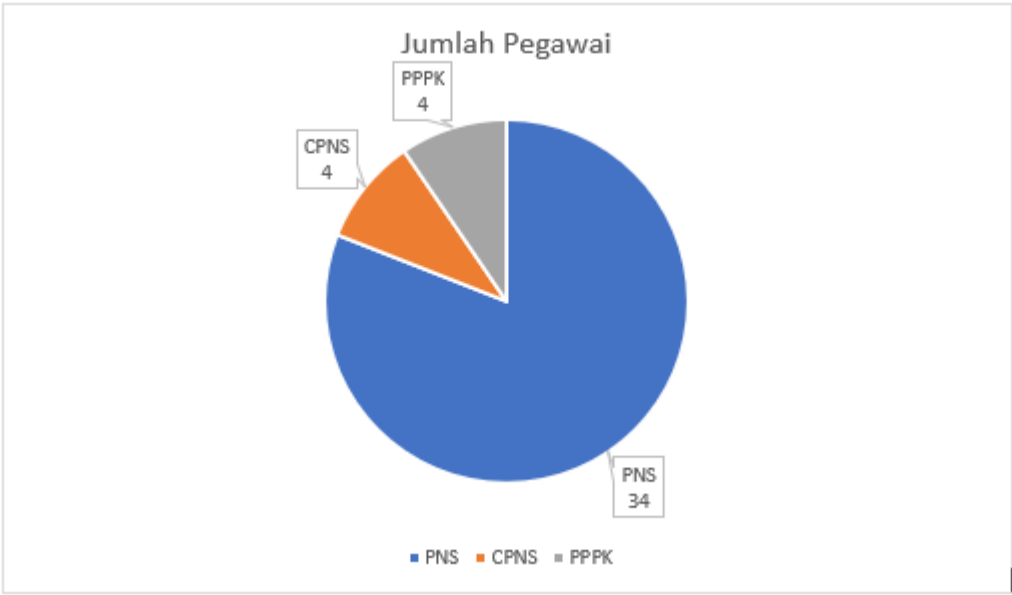
a. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada tahun 2023 dengan adanya kebutuhan organisasi dalam penguatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, maka telah dinaikkan level Loka POM di Kabupaten Bogor menjadi Balai POM di Bogor berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan diperkuatnya kelembagaan Balai POM di Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka semakin banyak tantangan yang dihadapi dalam melakukan

pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Koordinasi dan kolaborasi dengan internal Badan POM maupun dengan pentahelix semakin diperlukan.

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Bogor adalah sebanyak 42 Pegawai terdiri dari 34 Pegawai Negeri Sipil (PNS) , 4 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 4 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dimana jumlah tersebut berdasarkan analisis beban kerja (ABK) masih belum tercukupi. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan bisa dilihat pada gambar 2 dibawah ini.



Gambar 2 Data Pegawai Balai POM di Bogor berdasarkan Tahun 2025

c. Anggaran

Anggaran Balai POM di Bogor bersumber dari APBN sesuai DIPA Nomor: SP DIPA-063.01.2.672846/2025 yang diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2024 sebesar Rp. 9.774.448.000 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).

d. Sarana Prasana

Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja merupakan kegiatan penunjang/pendukung, namun sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tupoksi, kebutuhan pegawai, serta kelancaran operasional Balai POM di Bogor dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan peningkatan pelayanan. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai akan sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja dan berdampak.

Balai POM di Bogor terus mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas. Saat ini Balai POM di Bogor belum memiliki gedung kantor yang definitif/tetap , sehingga saat ini masih menyewa gedung untuk kantor

operasional laboratorium dan pelayanan publik.

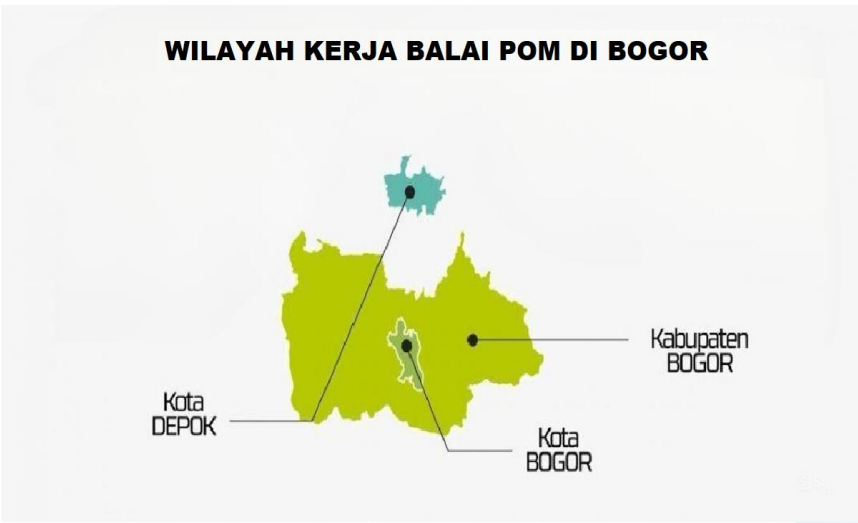
Perkembangan teknologi informasi menuntut tersedianya alat pengolah data dan komunikasi yang semakin memadai. Sebagai sarana penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dan membantu mendorong peningkatan kinerja pegawai, Balai POM di Bogor masih membutuhkan pemenuhan alat pengolah data dan komunikasi.

1.5.2 EKSTERNAL

A. Kondisi Geografis dan Demografis

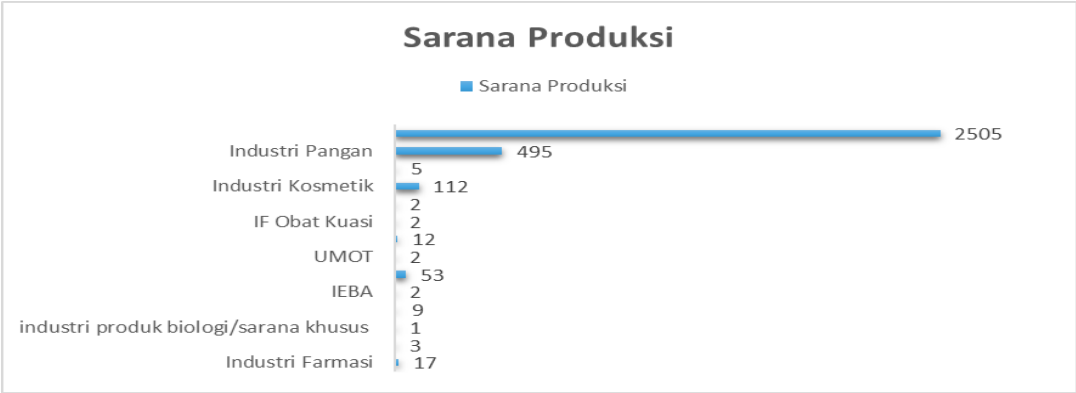
Berdasarkan PerBPOM Nomor 19 Tahun 2023, wilayah kerja Balai POM di Bogor meliputi 3 wilayah Kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok.

- Kabupaten Bogor
Luas : 2.986,20 km² (sumber : BPS Kabupaten Bogor Tahun 2021)
Penduduk : 5.489.536 (sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2021)
- Kota Bogor
Luas : 118.50 km² (sumber : BPS Kota Bogor Tahun 2017)
Penduduk : 1.052.359 (sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2021)
- Kota Depok
Luas : 200,29 km² (sumber : BPS Kota Depok Tahun 2018)
Penduduk : 2.056.335 (sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2020)

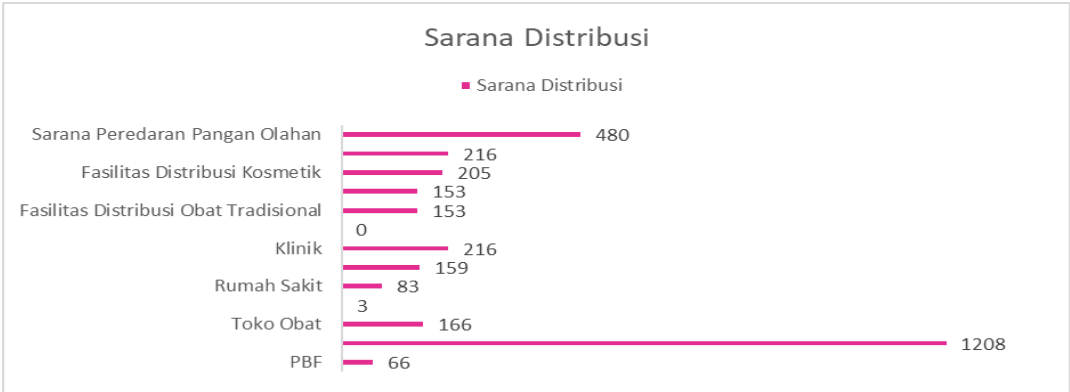


Gambar 3 Wilayah Kerja Balai POM di Bogor

B. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi



Gambar 4 Jumlah Sarana Produksi di wilayah kerja Balai POM di Bogor



Gambar 5 Jumlah Sarana Distribusi di wilayah kerja Balai POM di Bogor

1.5 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang mempengaruhi kinerja Balai POM di Bogor dikaji melalui Renstra 2025-2029 Balai POM di Bogor dibagi menjadi 2 yaitu, internal dan eksternal:

1.5.1 Internal

A. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada tahun 2023 dengan adanya kebutuhan organisasi dalam penguatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, maka telah dinaikkan level Loka POM di Kabupaten Bogor menjadi Balai POM di Bogor berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan diperkuatnya kelembagaan Balai POM di Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka semakin banyak tantangan yang dihadapi dalam melakukan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Koordinasi dan kolaborasi dengan internal Badan POM maupun dengan pentahelix semakin diperlukan

B. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Bogor adalah sebanyak 37 Pegawai terdiri dari 34 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dimana jumlah tersebut berdasarkan analisis beban kerja (ABK) masih belum tercukupi.

C. Sarana Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja merupakan kegiatan penunjang/pendukung, namun sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tupoksi, kebutuhan pegawai, serta kelancaran operasional Balai POM di Bogor dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan peningkatan pelayanan. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai akan sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja dan berdampak.

Balai POM di Bogor terus mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas. Saat ini Balai POM di Bogor belum memiliki gedung kantor yang definitif/tetap, sehingga saat ini masih menyewa gedung untuk kantor operasional laboratorium dan pelayanan publik.

Perkembangan teknologi informasi menuntut tersedianya alat pengolah data dan komunikasi yang semakin memadai. Sebagai sarana penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dan membantu mendorong peningkatan kinerja pegawai, Balai POM di Bogor masih membutuhkan pemenuhan alat pengolah data dan komunikasi.

1.5.2 Eksternal

A. Perkembangan Teknologi Farmasi Dan Inovasi Produk Obat

Perkembangan teknologi farmasi dan inovasi produk obat dan makanan yang menuntut inovasi dan intensifikasi pengawasan. Green Research and Opportunities With BPOM (GROW BPOM) merupakan salah satu inovasi yang dihasilkan oleh Balai POM di Bogor untuk memfasilitasi pemanfaatan produk inovasi oleh pelaku usaha Obat dan Makanan, sehingga mampu meningkatkan daya saing UMKM dan menghasilkan produk yang aman dan bermutu.

B. Tingginya minat masyarakat pada transaksi online

Perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0 tidak dapat dihindari, teknologi digital telah menyebar di seluruh sektor. Sebagian besar perusahaan menggunakan teknologi untuk melakukan pemasaran produknya, hal ini menjadi tantangan Badan POM sebagai institusi pengawas. Teknologi digital menyebabkan munculnya otomasi/teknologi baru yang menyebabkan perubahan yang luar biasa di semua disiplin ilmu. Untuk itu Balai POM di Bogor perlu melakukan penguatan untuk mencegah tindak kejahatan dan peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan yang dapat dilakukan melalui sarana online.

C. Perubahan program pemerintah dan fokus program ketahanan pangan sebagai program prioritas pemerintah yang membutuhkan dukungan Badan POM

D. Pesatnya pertumbuhan UMKM

Pesatnya pertumbuhan UMKM Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan. Balai POM di Bogor memiliki inovasi PINTAR UMKM, yaitu Pendampingan Seputar UMKM di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok., untuk melakukan jemput bola izin UMKM Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan. Melalui kegiatan desk registrasi pangan olahan telah berhasil diterbitkan 45 Nomor Izin Edar (NIE), 12 akun E-Registrasi Perusahaan, dan 5 Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dalam waktu 1 (satu) hari.

E. Penyesuaian program pemerintah daerah

Penyesuaian program pemerintah daerah yang membutuhkan dukungan Balai POM di Bogor, antara lain penyusunan rencana aksi pangan dan gizi daerah, Kota Pangan Aman, Kota Sehat, Pasar Pangan Sehat, sidak pasar, Gebyar Pelayanan Terpadu Daerah, pembentukan Tim Koordinasi dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan, pengawalan penggunaan Dana Alokasi Khusus oleh pemerintah daerah, dll. Balai POM di Bogor juga berperan aktif dalam penanggulangan penggunaan Obat dan Makanan Terlarang melalui inovasi TOT Cepot (Training of Trainer Cegah Penggunaan Obat dan Makanan Terlarang).

F. Membangun Jejaring Kerja sama dengan lintas sektor

Dalam penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Bogor harus membangun kerja sama dengan pentahelix untuk menunjang pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

G. Perubahan iklim dan bencana

Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian khususnya produk bahan Pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan Pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting sebagai pemasok Pangan dunia. Selain dari sisi Pangan, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan munculnya bibit penyakit baru hasil mutasi gen dari berbagai virus. Bibit penyakit baru tersebut variannya menjadi cukup banyak dan mudah tersebar dari satu negara ke negara lain.

Menurut Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Research Center for Climate Change University of Indonesia (RCCC-UI) tahun 2013, dalam pelaksanaan

kajian dan pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat perubahan iklim, terdapat 3 (tiga) penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus terkait perubahan iklim dan perkembangan vektor yaitu Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD), dan Diare. Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut, masih terdapat penyakit yang banyak ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti, Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) dan Penyakit Batu Ginjal.

Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan iklim, diperlukan peran Balai POM di Bogor dalam mengawasi peredaran varian Obat baru dari jenis penyakit tersebut. Selain dari Obat kimia, varian Obat baru ini juga diikuti pula dengan varian obat herbal tradisional Indonesia dan Cina yang paling banyak beredar di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras Balai POM di Bogor dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan produksi dan peredaran Obat tersebut.

H. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai POM di Bogor telah menyusun reformasi birokrasi (RB) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai POM di merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB.

a) Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran RB. Untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan, Loka POM di Kabupaten Bogor telah membentuk *agent of change* sebagai *role model* serta forum bagi pembelajaran atau inovasi dalam proses perubahan yang dilakukan. Komitmen dan keterlibatan pimpinan dan seluruh pegawai Balai POM di Bogor secara aktif dan berkelanjutan merupakan unsur pendukung paling utama dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam rangka pelaksanaan RB.

Untuk mengurangi risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan dibutuhkan media komunikasi secara reguler untuk mensosialisasikan RB atau perubahan yang sedang dan akan dilakukan, termasuk pentingnya peran *agent of change* dan manfaat dari forum pembelajaran atau inovasi. Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Balai POM di Bogor berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen Balai POM di Bogor tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu secara konsisten

dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan *Quality Management System* ISO 9001:2015.

b) Penataan Peraturan perundang-undangan dan Penegakan Hukum

Telah banyak Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menjadi landasan teknis pelaksanaan tugas fungsi Balai POM di Bogor. Pada level operasional, Balai POM di Bogor telah memiliki Pedoman Pengawasan yang jelas untuk acuan dalam pengawasan Obat dan Makanan, juga menerbitkan standar mutu lainnya, seperti standar produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Ketersediaan peraturan perundangan sampai dengan pedoman teknis yang dilegalkan dalam bentuk Peraturan Kepala BPOM tersebut sangat mendukung penegakan hukum. Tantangan ke depan, BPOM harus membuat terobosan dalam penegakan hukum seperti memperkuat kemitraan untuk pengawasan, penindakan, maupun persamaan persepsi dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait, menggeser pengawasan ke area preventif, serta memperkuat kerjasama di *Free Trade Zone Area*. Upaya ini pun perlu diikuti dengan peningkatan kajian Balai POM di Bogor mengenai kerugian negara secara ekonomi maupun kesehatan akibat pelanggaran Obat dan Makanan

c) Penataan dan Penguatan Struktur Organisasi

Tantangan BPOM ke depan adalah melakukan kajian, penataan, dan evaluasi organisasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. BPOM sebagai instansi vertikal, Balai POM di Bogor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu, Balai POM di Bogor turut mendukung program BPOM terkait peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi tersebut di atas.

d) Penataan Tatalaksana

Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Balai POM di Bogor berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen Balai POM di Bogor tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan atau perolehan *Quality Management System* ISO 9001: 2015.

e) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur Loka POM di Kabupaten Bogor yang didukung oleh

sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Perencanaan kebutuhan pegawai Balai POM di Bogor dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan proses penerimaan pegawai dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN serta promosi jabatan dilakukan secara terbuka. Pengembangan pegawai yang dilakukan Balai POM di Bogor berbasis kompetensi yang selanjutnya capaian penilaian kinerja individu pegawai akan dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja. Hal ini diimbangi dengan penegakan aturan disiplin dan kode etik serta pemberian sanksi. Seluruh aktivitas manajemen SDM tersebut didukung oleh sistem informasi kepegawaian.

Saat ini, Balai POM di Bogor telah memiliki kualitas yang cukup memadai, namun dari sisi kuantitas SDM Balai POM di Bogor belum mencukupi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi yang tersebar di wilayah kerja Balai POM di Bogor. Sistem manajemen pemerintah menuntut adanya ukuran keberhasilan, baik di tingkat organisasi sampai ke level individu. Untuk saat ini, sistem manajemen kinerja belum optimal diterapkan, sehingga perlu dilakukan penerapan sistem manajemen kinerja yang lebih efektif dan efisien terutama dalam hal pelaksanaan evaluasi terhadap peta dan kelas jabatan yang telah disusun. Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian yang telah dibangun juga perlu dilakukan optimalisasi sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM Balai POM di Bogor.

K. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Balai POM di Bogor telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik. Komitmen pimpinan yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan SAKIP menjadi kekuatan penting dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja Balai POM di Bogor. Namun, Balai POM di Bogor masih perlu melakukan penyempurnaan dalam penatausahaan manajemen pemerintahan (keuangan dan BMN) dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Ke depan, untuk menjawab ekspektasi masyarakat terhadap akuntabilitas Balai POM di Bogor selaku institusi pengawasan.

L. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Melalui upaya pengawasan yang dilakukan Balai POM di Bogor, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Balai POM di Bogor serta

menghindari tingkat penyalahgunaan wewenang. Pengawasan yang dilakukan Balai POM di Bogor antara lain melalui kebijakan penanganan gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), pengelolaan pengaduan masyarakat, implementasi whistle-blowing system, penanganan benturan kepentingan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, upaya pengawasan yang dilakukan Balai POM di Bogor tersebut masih perlu dievaluasi agar dapat ditingkatkan pelaksanaannya.

M. Pelayanan Publik

Menyadari bahwa pada hakekatnya instansi pemerintah merupakan ‘pelayan masyarakat’, Balai POM di Bogor senantiasa berbenah diri untuk dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima. Balai POM di Bogor menyediakan Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) untuk memberikan informasi terkait pengawasan Obat dan Makanan kepada masyarakat, antara lain layanan tatap muka langsung, layanan telepon, Whatsapp, email: bpom_bogor@pom.go.id, psblokapombogor@gmail.com Facebook Balai POM di Bogor, Twitter, Instagram @bpom.bogor.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2025-2029, hal itu tertuang pada Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

BPOM yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian melaksanakan penyusunan Rencana Strategis dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN TAHUN 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Dalam hal ini, RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2024.

Secara garis besar, lingkungan strategis yang dihadapi oleh BPOM khususnya Balai POM di Bogor sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) pada tahun 2025- 2029 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu eksternal dan internal. Isu eksternal antara lain Sistem Kesehatan Nasional (SKN), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional, Perubahan Iklim, Perubahan Demografi, Ekonomi dan Sosial Masyarakat, Tuntutan masyarakat, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Jejaring Kerja, Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Adapun untuk isu internal adalah Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana.

Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2025- 2029 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk itu, capaian target outcome dan output akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada akhir periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai impact assessment.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai POM di Kabupaten Bogor melalui Renstra yang telah disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi

Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia khususnya Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Loka POM di Kabupaten Bogor dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1.1 VISI

Visi dan misi pembangunan nasional untuk tahun 2025 – 2029 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2025- 2029 adalah Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

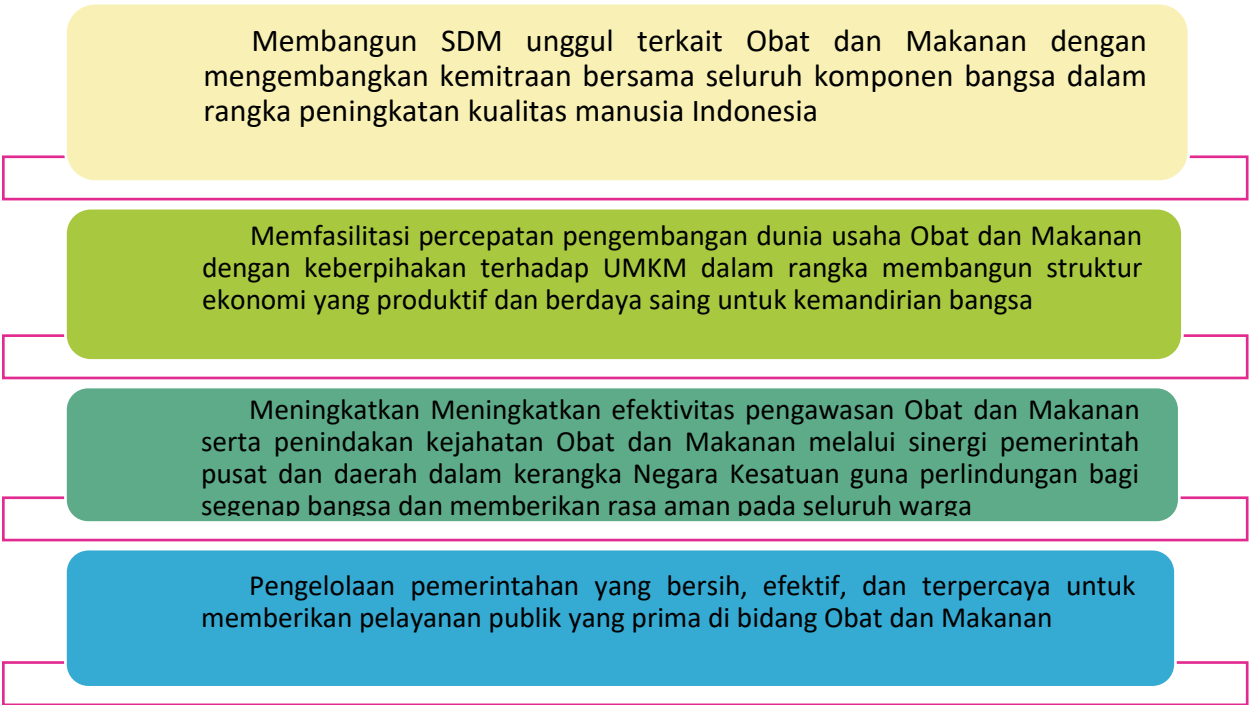
Sesuai dengan peran dan kewenangan unit kerja/ organisasi, Balai POM di Bogor harus memberikan kontribusi yang sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya bagi keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Badan POM periode 2025-2029. Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional, Badan POM telah menetapkan visi yang akan dicapai sesuai Rencana Strategis periode 2025-2029 adalah:

” Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi Badan POM merupakan komitmen Balai POM di Bogor dalam perannya sebagai unit pendukung Badan POM dalam pengawasan Obat dan Makanan.

2.1.2 MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Balai POM di Bogor mempunyai misi yang sama dengan misi Badan POM, yaitu:



Gambar 6 Misi Balai POM di Bogor

2.2 SASARAN KEGIATAN

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Badan POM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Badan POM akan dapat menapai sasaran strategis.

Sasaran Strategis Balai POM di Bogor dirumuskan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Bogor. Sasaran Strategis Balai POM di Bogor diturunkan mengambil sasaran.

strategis Badan POM yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di Bogor, sehingga sasaran strategis Balai POM di Bogor yaitu:

- h. Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- i. Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- j. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang bermutu

- k. Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- l. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- m. Layanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- n. Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif

Sedangkan Sasaran Kegiatan Balai POM di Bogor sebanyak 11 (sebelas) dan dan Indikator Kegiatan sebanyak 25 (dua puluh lima), sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

2. **Stakeholder Perspective:**

a. **Sasaran Kegiatan-1: Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- 1) Persentase Sediaan Farmasi yang dip dengan target sebesar 88,5% di tahun 2029;
- 2) Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)/Efek Samping Obat (ESO) ke Balai POM dengan target sebesar 30% di tahun 2029;
- 3) Persentase Pangan Olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 83% di tahun 2029;
- 4) Persentase Sampel Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar dengan target sebesar 100% di tahun 2029;
- 5) Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 85% di tahun 2029.

b. **Sasaran Kegiatan-2: Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor**

- 1) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu dengan target sebesar 88,5% di tahun 2029;

c. **Sasaran Kegiatan-3: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

- 1) Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target sebesar 83% di tahun 2029;
- 2) Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target sebesar 75% di tahun 2029;
- 3) Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target sebesar 95% di tahun 2029;
- 4) Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target sebesar 85% di tahun 2029;
- 5) Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan

target sebesar 90,20% di tahun 2029.

3. Internal Process Perspective:

a. Sasaran Kegiatan ke-4: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator:

- 1) Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan target sebesar 75% di tahun 2029;.

b. Sasaran Kegiatan ke-5: Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator:

- 1) Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL), dengan target sebesar 25% di tahun 2029;

c. Sasaran Kegiatan ke-6: Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di masing-masing wilayah kerja UPT.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, dengan indikator:

- 1) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan target sebesar 87,32% di tahun 2029;
- 2) Jumlah Sekolah Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) aman, dengan target sebesar 5 di tahun 2029;
- 3) Jumlah Desa Pangan Aman, dengan target sebesar 3 di tahun 2029;
- 4) Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis komunitas, dengan target sebesar 1 di tahun 2029.

d. Sasaran Kegiatan ke-7: Meningkatnya pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu:

- 1) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPOB) Pangan Olahan, dengan target sebesar 82% pada akhir 2029.

e. Sasaran Kegiatan ke-8: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu:

- 1) Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, dengan target sebesar 100% pada akhir 2029.

f. Sasaran Kegiatan ke-9: Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu:

- 1) Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT, dengan target sebesar 94% pada akhir 2029.

g. **Sasaran Kegiatan ke-10: Layanan Publik UPT yang Prima.**

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu:

1) Indeks Pelayanan Publik UPT, dengan target sebesar 4,60 pada akhir 2029.

4. **Learning and Growth Perspective**

a. **Sasaran Kegiatan ke-11: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal.**

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) UPT Badan POM, dengan target 81% pada akhir 2029;

2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT Badan POM, dengan target 81,50% pada akhir 2029;

3) Nilai Kinerja Anggaran UPT Badan POM, dengan target 4 di tahun 2029;

4) Indeks Manajemen risiko UPT Badan POM, dengan target 3 di tahun 2029;

2.3 **RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Rencana Strategis (Renstra) dengan penyusunan anggaran, maka disusunlah Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2025 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2025. Rencana Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah

Tabel 1 Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Bogor Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT).	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)/Efek Samping Obat (ESO) ke Balai POM	26
		Persentase Pangan Olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase Sampel Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar.	75
		Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai	100

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	ketentuan	
		Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	100
		Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)	14
6	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	83,96
		Jumlah Sekolah Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) aman	4
		Jumlah Desa Pangan Aman.	1
		Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis komunitas.	1
7	Meningkatnya pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu.	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) Pangan Olahan.	80
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.	80
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif.	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,2
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) UPT Badan POM	90
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT Badan POM	80,72
		Nilai Kinerja Anggaran UPT Badan POM.	90,50
		Indeks Manajemen Risiko UPT Badan POM	3,20

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Bogor menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Balai POM di Bogor tahun 2025-2029 dan DIPA Balai POM di Bogor Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah anggaran sebesar 9.774.448.000 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2025 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai POM di Bogor, sebagai berikut:

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Balai POM di Bogor Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,5
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing- masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	83,96
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	80
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,2

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	77
		Nilai AKIP UPT BPOM	79,5
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	4
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,6

2.5 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BOGOR TAHUN 2025

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025 menyajikan target triwulan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Bogor beserta anggarannya sebagaimana tabel dibawah. Terdapat revisi RAPK yang ditetapkan di awal tahun 2025. Adapun RAPK yang ditetapkan di awal tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Bogor Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target (%)												Anggaran
		B0 1	B0 2	B03	B0 4	B0 5	B0 6	B0 7	B0 8	B0 9	B1 0	B1 1	B12	(Rupiah)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	116.695.000
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	49.600.000
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	42.945.600
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	21.579.650
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	3.734.400
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	5	12	20	26	32	40	48	56	64	72	80	88	64.738.950
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	64.738.950

	ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	64.738.950
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	107.898.250
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	107.898.250
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	11.580.000
2	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	63	8.465.000
3	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	0	4	4	4	7	7	7	12	12	12	14	2.067.104.000
4	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	0	0	83,96	83,96	83,96	83,96	83,96	83,96	83,96	83,96	83,96	83,96	127.399.000
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100	4	150.771.000
	Jumlah desa pangan aman	0	0	25	25	40	45	65	75	85	90	100	1	127.155.000
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	5	20	30	50	55	60	75	80	90	100	1	68.190.000
5	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10	10	20	25	30	40	50	55	60	65	70	91	70.444.000
6	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	5	10	15	25	40	55	70	75	80	80	80	80	218.924.000
7	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	49.000.000
8	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,2	143.600.000

9	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	1.521.811.750
	Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,5	1.521.811.750
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1.521.811.750
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,2	1.521.811.750

2.6 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini:

Rumus Pengukuran **INDIKATOR POSITIF**
(semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya)

Rumus Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF**
(semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya)

Rumus Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** yang satuannya **BUKAN DALAM %**
(semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya)

Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) seperti dibawah ini.

Nilai pencapaian sarannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS\ 2 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2}{2}$$

$$NPS\ 3 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3}{3}$$

$$NPS\ 4 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3 + 1NPI\ 4}{4}$$

$$NPS\ 5 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3 + 1NPI\ 4 + 1NPI\ 5}{5}$$

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

Gambar 7 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 dan Penetapan Kinerja tahun 2025 Balai POM di Bogor memuat 10 (sepuluh) sasaran kegiatan. Pencapaian kesepuluh sasaran kegiatan Balai POM di Bogor pada triwulan II tahun 2025 secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN 2025

SASARAN KEGIATAN	Nilai Pencapaian Sasaran Strategis	KATEGORI	
1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Bogor	110,08	Sangat Baik	
2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	200	Tidak Dapat Disimpulkan	
3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Bogor	117,14	Sangat Baik	
4. Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Bogor	136,44	Tidak Dapat Disimpulkan	
5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	104,18	Sangat Baik	
6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.	102,27	Sangat Baik	
7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Bogor	100	Baik	
8 Layanan Publik UPT yang prima	Baru dilakukan penilaian di akhir tahun		
9. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal	Baru dilakukan penilaian di akhir tahun		
10. Meningkatnya kepuasan masyarakat dan pelaku usaha pengguna layanan atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik BPOM	Baru dilakukan penilaian di akhir tahun		

Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 26 (dua puluh enam) indikator kinerja utama. Secara lengkap perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja utama dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5 PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Bogor	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	92,16	111,95	Sangat Baik
		2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	-
		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	Baik
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	40	42,27	105,68	Sngat Baik
		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	77,49	103,32	Sangat Baik
		8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65	96,3	148,15	Tidak Dapat Disimpulkan
		9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,5	108,8	120,22	Tidak Dapat Disimpulkan
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100,14	133,52	Tidak Dapat Disimpulkan
		11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82	99,55	121,40	Tidak Dapat Disimpulkan
		Nilai Pencapaian Sasaran Strategis			110,08	Sangat Baik
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	30	60	200	Tidak Dapat Disimpulkan
		Nilai Pencapaian Sasaran Strategis			200	Tidak Dapat Disimpulkan
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	7	8,2	117,14	Sangat Baik
		Nilai Pencapaian Sasaran Strategis			117,14	Sangat Baik
4	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	83,96	87,96	104,76	Sangat Baik
		15. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	50	70	140	Tidak Dapat Disimpulkan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
		16. Jumlah Desa Pangan Aman	45	70	155,56	Tidak Dapat Disimpulkan
		17. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	55	80	145,45	Tidak Dapat Disimpulkan
		Nilai Pencapaian Sasaran Strategis			136,44	Tidak Dapat Disimpulkan
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	40	41,67	104,18	Sangat Baik
		Nilai Pencapaian Sasaran Strategis			104,18	Sangat Baik
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19. Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	55	56,25	102,27	Sangat Baik
		Nilai Pencapaian Sasaran Strategis			102,27	Sangat Baik
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.	50	50	100	Baik
		Nilai Pencapaian Sasaran Strategis			100	Baik
8	Layanan Publik UPT yang prima	21. Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-
		Nilai Pencapaian Sasaran Strategis			-	-
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal	22. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	77	-		
		23. Nilai AKIP UPT	79,5			
		24. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	4	-		
		25. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,6	-		
		Nilai Pencapaian Sasaran Strategis			-	
10	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan pelaku usaha pengguna layanan atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik BPOM	26. Indeks Kepuasan Masyarat	91,5	-		
		Nilai Pencapaian Sasaran Strategis				

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Bogor, sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN KE-1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Bogor

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 11 (sebelas) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan kesebelas indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **110,08%** dengan kategori **Sangat Baik**. Hasil Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-1 Triwulan II TAHUN 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	92,36	111,95	Sangat Baik	
	2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-			
	3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan	
	4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	Baik	
	5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan	
	6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	40	42,27	105,68	Sangat Baik	
	7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	77,49	103,32	Sangat Baik	
	8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65	96,3	148,15	Tidak Dapat Disimpulkan	
	9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,5	108,8	120,22	Sangat Baik	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
	10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100,14	133,52	Tidak Dapat Disimpulkan	
	11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82	99,55	121,40	Tidak Dapat Disimpulkan	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

3.1.1.1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Tabel 7 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN” TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	92,16	111,95	Sangat Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada Triwulan II Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 82,50%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 92,16% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 111,95% dan memperoleh kriteria **Sangat Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TARGET DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

Apabila dibandingkan realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II terhadap realisasi Triwulan I, terjadi penurunan. Persentase capaian Triwulan II turun sebesar 5,82% dibandingkan dengan Triwulan I.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 telah melampaui target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Melampaui**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 8 Perbandingan Realisasi “Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	92,16	111,95	Tercapai/ Melampaui	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, meliputi 4 (empat) komoditi yaitu Obat, Obat bahan alam dan kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika. Masing-masing komoditi memiliki beberapa parameter penilaian sebagai berikut :

1. Komoditi Obat meliputi perencanaan sampling, kesesuaian pelaksanaan sampling, kesesuaian pelaksanaan pengujian, kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian dan kesesuaian pelaporan monitoring penarikan.
2. Komoditi Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi meliputi pemenuhan target pengawasan; kelengkapan laporan dan ketepatan waktu pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan; kesesuaian parameter uji; akurasi dalam penentuan kesimpulan (penandaan, pengujian dan akhir/ gabungan); dan tanggapan atas surat tindak lanjut.
3. Komoditi Suplemen Kesehatan meliputi pemenuhan target pengawasan; kelengkapan laporan dan ketepatan waktu pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan; kesesuaian parameter uji; akurasi dalam penentuan kesimpulan (penandaan, pengujian dan akhir/ gabungan) serta tanggapan atas surat tindak lanjut
4. Komoditi Kosmetik meliputi pemenuhan target pengawasan; kesesuaian pelaksanaan sampling; kelengkapan laporan dan ketepatan waktu pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan; ketepatan dalam penentuan kesimpulan (penandaan, pengujian dan akhir/ gabungan); serta tanggapan atas surat tindak lanjut

Keberhasilan atas tercapainya IKU persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi :

1. Telah disusun perencanaan pengambilan dan pelaksanaan pengujian sampel sediaan farmasi sesuai dengan ketentuan Pedoman sampling dan Pengujian 2025
2. Adanya komitmen petugas sampling dan pengujian dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi kinerja dan anggaran secara berkala (1 bulan sekali) berdasarkan parameter penilaian masing-masing komoditi

- Adanya efisiensi yang menyebabkan jumlah sampel sedikit pada TW I, sehingga dilakukan koordinasi dengan Balai Penguji/Balai Regionalisasi untuk percepatan pelaksanaan sampling dan pengujian pada TW II.

**E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA**

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

- Perencanaan sampling dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara Balai Penyampling dan Balai Penguji/Balai regionalisasi (Peta kemampuan uji dan kendala-kendala pengujian) sehingga resiko penolakan sampel dapat dikendalikan
- Menjalin komunikasi yang baik dengan Balai penguji/Balai regionalisasi
- Percepatan pelaksanaan pengambilan sampel dan pengujian pada TW II karena adanya efisiensi anggaran pada TW I
- Tersedianya link Monitoring dan evaluasi yang dapat diakses dan di update dalam secara berkala kapan dan dimanapun.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan” triwulan II tahun 2025

Tabel 9 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	111,95	92,10	1,22	0,22	EFISIEN

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan disimpulkan dengan kategori **Efisien** dengan tingkat efisiensi 0,22.

3.1.1.2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan

Farmakovigilans) Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = (A / B) x 100%

A merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

B merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 10 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO” TW II TAHUN 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	-	-

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada triwulan II tahun 2025 belum diperoleh nilai Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO. Nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2025.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Belum tersedia realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO pada triwulan II tahun 2025. Realisasi akan diperoleh pada akhir tahun 2025. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 11 Perbandingan Realisasi “Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	-	-

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Analisis belum bisa dilaksanakan pada TW ini karena nilai capaian belum ada pada TW berjalan.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Analisis belum bisa dilaksanakan pada TW ini karena nilai capaian belum ada pada TW berjalan.

3.1.1.3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. kesesuaian target sampel UPT;
2. kesesuaian parameter uji;
3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Hasil Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan oleh Balai POM di Bogor Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada dibawah ini.

Tabel 12 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada Triwulan II Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 75%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 133,33% dan memperoleh kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Apabila dibandingkan realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II terhadap realisasi Triwulan I, terjadi kenaikan. Persentase capaian Triwulan II naik sebesar 26,66% dibandingkan dengan Triwulan I.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 telah mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Melampaui**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 13 Perbandingan Realisasi “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	Tercapai/ Melampaui	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA) UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS

Capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan kolaborasi antara Balai penyampling (fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian) serta Balai pengujian/Balai regionalisasi. Kesesuaian pelaksanaan sampling dengan perencanaan yang telah disusun, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, serta tindak lanjut sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi penyumbang keberhasilan. Penyebab keberhasilan pencapaian IKU bahkan melebihi target pada masing-masing komponen penilaian di atas antara lain disebabkan oleh:

- 1. Telah disusun perencanaan pengambilan dan pelaksanaan pengujian sampel pangan olahan sesuai dengan ketentuan Pedoman sampling dan Pengujian 2025
- 2. Adanya komitmen petugas sampling dan pengujian dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu
- 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi kinerja dan anggaran secara berkala (1 bulan sekali) berdasarkan parameter penilaian
- 4. Adanya efisiensi yang menyebabkan jumlah sampel sedikit pada TW I, sehingga dilakukan koordinasi dengan Balai Penguji/Balai Regionalisasi untuk percepatan pelaksanaan sampling dan pengujian pada TW II.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

- 1. Perencanaan sampling dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara Balai Penyampling dan Balai Penguji/Balai regionalisasi (Peta kemampuan uji dan kendala-kendala pengujian) sehingga resiko penolakan sampel dapat dikendalikan
- 2. Menjalin komunikasi yang baik dengan Balai penguji/Balai regionalisasi
- 3. Percepatan pelaksanaan pengambilan sampel dan pengujian pada TW II karena adanya efisiensi anggaran pada TW I
- 4. Tersedianya link Monitoring dan evaluasi yang dapat diakses dan di update dalam secara berkala kapan dan dimanapun.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 14 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	133,33	94,66	1,41	0,41	EFISIEN

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan disimpulkan dengan kategori **Efisien** dengan tingkat efisiensi 0,41.

3.1.1.4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk Pangan Olahan Dalam Kemasan (PODK) juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

- 1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
- 2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar:

$$\frac{\text{Jumlah Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar}}{\text{Total jumlah sampel KLB keracunan pangan dikirim atau diuji ke BPOM}} \times 100\%$$

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 15 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada Triwulan II Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar sebesar 100%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 100% dan memperoleh kriteria **Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Apabila dibandingkan realisasi Persentase sampel Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Triwulan II terhadap realisasi Triwulan I, terjadi kenaikan. Persentase capaian Triwulan II naik sebesar 100% dibandingkan dengan Triwulan I karena tidak ada realisasi di triwulan I.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 telah mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Tercapai/Melampaui**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 16 Perbandingan Realisasi “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	Tercapai/Melampaui	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Analisa keberhasilan adalah komitmen petugas KLB dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya dan melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan sehingga hasil pelaporan dapat dilakukan tepat waktu.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 17 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya “Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	17,65	5,67	4,67	TIDAK EFISIEN

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar disimpulkan dengan kategori **Tidak Efisien** dengan tingkat efisiensi 4,67. Karena capaian realisasi anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

3.1.1.5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.

- a. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
- b. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- c. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 18 Perbandingan Realisasi “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada Triwulan II Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 75%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 133,33% dan memperoleh kriteria **Tidak dapat disimpulkan**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Apabila dibandingkan realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II terhadap realisasi Triwulan I, terjadi kenaikan. Persentase capaian Triwulan II naik sebesar 20% dibandingkan dengan Triwulan I.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 telah mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Melampaui**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 19 Perbandingan Realisasi “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	Tercapai/ Melampaui	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Capaian Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan kolaborasi antara Balai penyampling (fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian) serta Balai pengujian/Balai regionalisasi. Kesesuaian pelaksanaan sampling dengan perencanaan yang telah disusun, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, serta tindak lanjut sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi penyumbang keberhasilan. Penyebab keberhasilan pencapaian IKU bahkan melebihi target pada masing-masing komponen penilaian di atas antara lain disebabkan oleh:

1. Telah disusun perencanaan pengambilan dan pelaksanaan pengujian sampel PIRT sesuai dengan ketentuan Pedoman sampling dan Pengujian 2025
2. Adanya komitmen petugas sampling dan pengujian dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi kinerja dan anggaran secara berkala (1 bulan sekali) berdasarkan parameter penilaian
4. Adanya efisiensi yang menyebabkan jumlah sampel sedikit pada TW I, sehingga dilakukan koordinasi dengan Balai Penguji/Balai Regionalisasi untuk percepatan pelaksanaan sampling dan pengujian pada TW II.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

1. Perencanaan sampling dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara Balai Penyampling dan Balai Penguji/Balai regionalisasi (Peta kemampuan uji dan kendala-kendala pengujian) sehingga resiko penolakan sampel dapat dikendalikan
2. Menjalin komunikasi yang baik dengan Balai penguji/Balai regionalisasi
3. Percepatan pelaksanaan pengambilan sampel dan pengujian pada TW II karena adanya efisiensi anggaran pada TW I
4. Tersedianya link Monitoring dan evaluasi yang dapat diakses dan di update dalam secara berkala kapan dan dimanapun.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 20 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	133,33	94,66	1,41	0,41	EFISIEN

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan disimpulkan dengan kategori **Efisien** dengan tingkat efisiensi 0,41.

3.1.1.6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Balai POM di Bogor kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Stakeholder /pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha sebagai objek pengawasan

dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 21 Perbandingan Realisasi “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	40	42,27	105,68	Sangat Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada Triwulan II Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sebesar 40%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 42,27% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 105,68% dan memperoleh kriteria **Sangat Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Apabila dibandingkan realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Triwulan II terhadap realisasi Triwulan I, terjadi penurunan. Persentase capaian Triwulan II turun sebesar 684,63% dibandingkan dengan Triwulan I. Capaian pada triwulan I sangat tinggi disebabkan realisasi yang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder triwulan II tahun 2025 belum mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Perlu Upaya keras**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 22 Perbandingan Realisasi “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	40	42,27	105,68	Tercapai/ Melampaui	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Target indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder triwulan II tahun 2025 dapat memenuhi kategori “**Sangat Baik**”, disebabkan oleh koordinasi dengan pelaku usaha dan lintas sektor terkait untuk menindaklanjuti surat rekomendasi yang telah diterbitkan Balai POM di Bogor. Namun masih terdapat surat rekomendasi ke lintas sektor yang belum mendapat balasan pada Triwulan II, terkait peralihan tugas ke personel lain dan akan dibalas pada TW III.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Program atau kegiatan yang dapat menunjang pencapaian target indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder pada triwulan II adalah meminta nomor telepon maupun email pelaku usaha yang dapat dihubungi untuk melakukan *follow up* serta rutin berkoordinasi dengan lintas sektor terkait agar segera memberikan balasan rekomendasi yang telah diterbitkan UPT.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 23 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	105,68	21,40	4,94	3,94	TIDAK EFISIEN

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder disimpulkan

dengan kategori **Tidak Efisien** dengan tingkat efisiensi 3,94. Karena capaian realisasi anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

3.1.1.7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi sediaan farmasi yaitu meliputi:

- 1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
- 2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, industri ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dan industri suplemen kesehatan.
- 3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Sarana produksi sediaan farmasi tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan pengawasan, persiapan inspeksi, pelaksanaan inspeksi, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sarana produksi sediaan farmasi tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah rata-rata dari % Sarana Produksi Obat, % Sarana Produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarana Produksi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 24 Perbandingan Realisasi “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	77,49	103,32	Sangat Baik	

A. **PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025**

Pada Triwulan II Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 75%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 77,49% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 103,32% dan memperoleh kriteria **Sangat Baik**.

B. **PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA**

Apabila dibandingkan realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II terhadap realisasi Triwulan I, terjadi penurunan. Persentase capaian Triwulan II turun sebesar 30,01% dibandingkan dengan Triwulan I

C. **PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025**

Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 telah mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Melampaui**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 25 Perbandingan Realisasi “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	77,49	103,32	Tercapai/ Melampaui	

D. **ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)**

Indikator kinerja ini dapat mencapai target dan memenuhi kategori “**Sangat Baik**” karena didukung dengan pelatihan, koordinasi dan pembekalan terhadap personel (inspektur) Balai POM di Bogor serta koordinasi yang berjalan dengan unit pengampu di Badan POM Pusat. Selain itu, pencapaian ini juga didukung dengan perencanaan dan monitoring kegiatan inspeksi yang berjalan dengan baik.

E. **ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA**

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini adalah adanya monitoring secara berkala untuk memastikan pemeriksaan yang dilakukan telah dilaporkan

dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Kegiatan koordinasi dengan Unit Pengampu di Badan POM pusat serta UPT lain juga dapat memberikan pemahaman dan strategi untuk mencapai target tersebut.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 26 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	103,32	21,40	4,83	3,83	TIDAK EFISIEN

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan kategori **Tidak Efisien** dengan tingkat efisiensi 3,83. Karena capaian realisasi anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

3.1.1.8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dianggap berisiko berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu tindak lanjut, dan
- 2.Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 27 Perbandingan Realisasi “Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan	65	96,3	148,15	Tidak Dapat Disimpulkan	

ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
----------------------------------	--	--	--	--	--

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada Triwulan II Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 65%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 96,30% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 148,15% dan memperoleh kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Apabila dibandingkan realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II terhadap realisasi Triwulan I, terjadi penurunan. Persentase capaian Triwulan II turun sebesar 5,70% dibandingkan dengan Triwulan I.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 telah mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Melampaui**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 28 Perbandingan Realisasi “Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65	96,30	148,15	Tercapai/ Melampaui	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Indikator kinerja ini mendapatkan kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”** karena capaian yang terlalu tinggi. Capaian yang terlalu tinggi ini didukung oleh adanya pelatihan, koordinasi dan pembekalan terhadap personel (inspektur) Balai POM di Bogor serta koordinasi yang berjalan dengan unit pengampu di Badan POM Pusat. Selain itu, pencapaian ini juga didukung dengan perencanaan dan monitoring kegiatan inspeksi yang berjalan dengan baik.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Capaian yang terlalu tinggi pada sebagian besar UPT BPOM untuk beberapa IKU telah diatasi dengan melakukan revisi untuk menaikkan target yang ditetapkan pada akhir TW II bersama dengan tim dari Biro Perencanaan dan Keuangan serta Unit Pengampu masing-masing IKU, namun belum ada surat terkait penetapan target baru yang dapat dipakai menjadi acuan data untuk monitoring evaluasi TW II. Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini adalah adanya monitoring secara berkala untuk memastikan pemeriksaan yang dilakukan telah dilaporkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Kegiatan koordinasi dengan Unit Pengampu di Badan POM pusat serta UPT lain juga dapat memberikan pemahaman dan strategi untuk mencapai target tersebut.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 29 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	148,15	21,40	6,92	5,92	TIDAK EFISIEN

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan kategori **Tidak Efisien** dengan tingkat efisiensi 5,92. Karena capaian realisasi anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

3.1.1.9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- a. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- b. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- d. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa

adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 30 Perbandingan Realisasi “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,5	108,80	120,22	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada Triwulan II Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 90,5%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 108,80% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 120,22% dan memperoleh kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

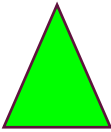
B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Apabila dibandingkan realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II terhadap realisasi Triwulan I, terjadi kenaikan. Persentase capaian Triwulan II naik sebesar 42,87% dibandingkan dengan Triwulan I.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 belum mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Melampaui**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 31 Perbandingan Realisasi “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,5	108,80	120,22	Tercapai/ Melampaui	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Indikator kinerja ini dapat mencapai target dan memenuhi kategori “Sangat Baik” karena didukung dengan pelatihan, koordinasi dan pembekalan terhadap personel (inspektur) Balai POM di Bogor serta koordinasi yang berjalan dengan unit pengampu di Badan POM Pusat. Selain itu, pencapaian ini juga didukung dengan perencanaan dan monitoring kegiatan inspeksi yang berjalan dengan baik.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini adalah adanya monitoring secara berkala untuk memastikan pemeriksaan yang dilakukan telah dilaporkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Kegiatan koordinasi dengan Unit Pengampu di Badan POM pusat serta UPT lain juga dapat memberikan pemahaman dan strategi untuk mencapai target tersebut.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 32 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	120,22	21,86	5,50	4,50	TIDAK EFISIEN

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan kategori **Tidak Efisien** dengan tingkat efisiensi 4,50. Karena capaian realisasi anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja

3.1.1.10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 33 Perbandingan Realisasi “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100,14	133,52	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada Triwulan II Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 75%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 100,14% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 133,52% dan memperoleh kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Apabila dibandingkan realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II terhadap realisasi Triwulan I, terjadi kenaikan. Persentase capaian Triwulan II naik sebesar 0,19% dibandingkan dengan Triwulan I.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 telah mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Melampaui**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 34 Perbandingan Realisasi “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100,14	133,52	Tercapai/ Melampaui	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Indikator kinerja ini mendapatkan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan” karena capaian yang terlalu tinggi. Capaian yang terlalu tinggi ini didukung oleh adanya pelatihan, koordinasi dan pembekalan terhadap personel (inspektur) Balai POM di Bogor serta koordinasi yang berjalan dengan unit pengampu di Badan POM Pusat. Selain itu, pencapaian ini juga didukung dengan perencanaan dan monitoring kegiatan inspeksi yang berjalan dengan baik.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Capaian yang terlalu tinggi pada sebagian besar UPT BPOM untuk beberapa IKU telah diatasi dengan melakukan revisi untuk menaikkan target yang ditetapkan pada akhir TW II bersama dengan tim dari Biro Perencanaan dan Keuangan serta Unit Pengampu masing-masing IKU, namun belum ada surat terkait penetapan target baru yang dapat dipakai menjadi acuan data untuk monitoring evaluasi TW II. Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini adalah adanya monitoring secara berkala untuk memastikan pemeriksaan yang dilakukan telah dilaporkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Kegiatan koordinasi dengan Unit Pengampu di Badan POM pusat serta UPT lain juga dapat memberikan pemahaman dan strategi untuk mencapai target tersebut.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 35 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	133,52	21,86	6,11	5,11	TIDAK EFISIEN

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan kategori **Tidak Efisien** dengan tingkat efisiensi 5,11. Karena capaian realisasi anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

3.1.1.11 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan. Iklan yang diawasi dilaksanakan melalui tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 36 Perbandingan Realisasi “Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82	99,55	121,40	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada Triwulan II Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 82%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 99,55% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 121,40% dan memperoleh kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Apabila dibandingkan realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan II terhadap realisasi Triwulan I, terjadi kenaikan. Persentase capaian Triwulan II naik sebesar 6,99% dibandingkan dengan Triwulan I.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 telah mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Melampaui**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 37 Perbandingan Realisasi “Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82	99,55	121,40	Tercapai/ Melampaui	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan terdiri dari iklan obat, iklan kosmetik, iklan obat bahan alam dan iklan obat kuasi, Iklan suplemen kesehatan, dan iklan pangan olahan. berbagai parameter penilaian. Penyebab keberhasilan pencapaian IKU bahkan melebihi target pada masing-masing komponen penilaian di atas antara lain disebabkan oleh:

1. Telah disusun perencanaan pengawasan iklan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran terkait target dan ketentuan pengawasan iklan pada masing-masing komoditi
2. Adanya komitmen petugas dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi kinerja dan anggaran secara berkala (1 bulan sekali) berdasarkan parameter penilaian.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah perencanaan pengawasan iklan dibuat berdasarkan surat edaran dan ketentuan masing-masing komoditi

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 38 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	121,40	23,35	5,20	4,20	TIDAK EFISIEN

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan kategori **Tidak Efisien** dengan tingkat efisiensi 4,20. Karena capaian realisasi anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

SASARAN KEGIATAN KE-2: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Sarana produksi pangan fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. Sarana pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindaklanjuti berdasarkan regulasi

perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator. Berdasarkan perhitungan indikator tersebut, diperoleh hasil capaian sebesar **200%** dengan kriteria pencapaian **Tidak Dapat Disimpulkan**. Rincian capaian kinerja sasaran kegiatan ke-2 triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 39 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-2 TRIWULAN II TAHUN 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	30	60	200	Tidak Dapat Disimpulkan

3.1.2.1 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 40 Perbandingan Realisasi “Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	30	60	200	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada Triwulan II Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 30%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 60% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 200% dan memperoleh kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

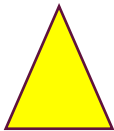
B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Apabila dibandingkan realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II terhadap realisasi Triwulan I, terjadi kenaikan. Persentase capaian Triwulan II naik sebesar 66,67% dibandingkan dengan Triwulan I.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 belum mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Akan Tercapai**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 41 Perbandingan Realisasi “Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	60	73,17	Akan Tercapai	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Indikator kinerja ini mendapatkan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan” karena capaian yang terlalu tinggi. Capaian yang terlalu tinggi ini didukung oleh adanya pelatihan, koordinasi dan pembekalan terhadap personel (inspektur) Balai POM di Bogor serta koordinasi yang berjalan dengan unit pengampu di Badan POM Pusat. Selain itu, pencapaian ini juga didukung dengan perencanaan dan monitoring kegiatan inspeksi yang berjalan dengan baik.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Capaian yang terlalu tinggi pada sebagian besar UPT BPOM untuk beberapa IKU telah diatasi dengan melakukan revisi untuk menaikkan target yang ditetapkan pada akhir TW II bersama dengan tim dari Biro Perencanaan dan Keuangan serta Unit Pengampu masing-masing IKU, namun belum ada surat terkait penetapan target baru yang dapat dipakai menjadi acuan data untuk monitoring evaluasi TW II. Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini adalah adanya monitoring secara berkala untuk memastikan pemeriksaan yang dilakukan telah dilaporkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Kegiatan koordinasi dengan Unit Pengampu di Badan POM pusat serta UPT lain juga dapat memberikan pemahaman dan strategi untuk mencapai target tersebut.

SASARAN KEGIATAN KE-3: Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Balai POM di Bogor termasuk kategori laboratorium tingkat 2. SKL laboratorium tingkat 2 terdiri dari 3 (empat) komponen yaitu

pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan dan Standar Kompetensi Laboratorium.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator. Berdasarkan perhitungan indikator tersebut, diperoleh hasil capaian sebesar **117,6%** dengan kriteria pencapaian **Sangat Baik**. Rincian capaian kinerja sasaran kegiatan ke-3 triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 42 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-3 TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
1	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	7	8,20	117,6	Sangat Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada Triwulan II Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sebesar 7. Realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 8,20 dengan memperoleh persentase capaian sebesar 117,6% dan memperoleh kriteria **Sangat Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Apabila dibandingkan realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan II terhadap realisasi Triwulan I, terjadi kenaikan. Nilai SKL capaian Triwulan II naik menjadi sebesar 8,2 dibandingkan dengan Triwulan I dengan nilai SKL 6,1. Adapun secara persentase pada Triwulan I sebesar 152,5% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan dan Triwulan II sebesar 117,6% dengan kriteria **Sangat Baik**.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan II tahun 2025 telah mencapai target triwulan II

Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Tercapai/ Melampaui**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 43 Perbandingan Realisasi “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	7	8,20	117,6	Tercapai/ Melampaui	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Keberhasilan peningkatan kinerja diperoleh dari nilai SKL dari komponen nilai pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL) sebesar 0,1%, nilai pemenuhan standar peralatan sebesar 40,80%, dan nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium sebesar 20,0% sehingga nilai pemenuhan SKL Triwulan II mencapai realisasi 8,2 % dengan target nilai SKL Triwulan II adalah 7 %. Maka, nilai pencapaian sasaran (NPS) dari indikator kegiatan Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah 117,6% dengan Kategori **Tercapai/ Melampaui**. Naiknya nilai pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL) sebesar 0,1% yang triwulan sebelumnya 0% disebabkan oleh telah dilakukan verifikasi metode analisis identifikasi asam borat dalam produk kosmetik dan nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium sebesar 20,0% yang triwulan sebelumnya 0%. Namun, nilai pemenuhan standar peralatan sebesar 40,80% tetap sama dibandingkan dengan nilai triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh anggaran pembelian alat laboratorium mengalami pemblokiran sementara saat diberlakukannya program efisiensi anggaran. Meskipun, triwulan II ini anggaran pembelian alat laboratorium sudah mengalami pembukaan blokir. Proses pengadaan alat laboratorium masih berjalan pada tahap pemilihan penyedia pada e-Katalog setelah mendapatkan persetujuan rekomendasi perubahan alat laboratorium semula seperangkat alat densitometer menjadi Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) dari P3OMN.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Adapun pencapaian indikator kegiatan Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah kegiatan verifikasi metode analisis identifikasi asam

borat dalam produk kosmetik sekaligus meningkatkan nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium. Hal tersebut menyumbang nilai cukup besar dalam penilaian pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium khususnya nilai pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL) dan nilai pemenuhan standar peralatan dan nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium.

Pada umumnya terdapatnya efisiensi penggunaan sumber daya tidak terlalu berpengaruh terhadap pemenuhan Standar Ruang Lingkup pada pemenuhan nilai SKL, karena laboratorium Balai POM di Bogor rata-rata masih mempunyai fasilitas peralatan laboratorium yang sudah didapat tahun 2024. Meskipun, strategi pengadaan bahan reagensia dan media mikrobiologi menggunakan sisa dari pengadaan alat laboratorium dengan merevisi anggaran sisa dari pembelian pengadaan alat laboratorium menjadi pembelian bahan reagensia dan media mikrobiologi. Hal ini akan meningkatkan nilai SKL untuk triwulan berikutnya sehingga secara keseluruhan mendapatkan nilai dengan kategori **Tercapai/ Melampaui**.

SASARAN KEGIATAN KE-4: Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

3.1.4 SASARAN KEGIATAN KE-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui

media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital, dan media luar ruang. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

- a. Sumber atau Narasumber KIE
- b. Konten atau Informasi KIE
- c. Pemahaman Audiens KIE
- d. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Berdasarkan perhitungan ke-empat indikator tersebut, diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 136,44% dengan kriteria pencapaian **Tidak Dapat Disimpulkan**. Rincian capaian kinerja sasaran kegiatan ke-4 triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 44 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-4 TRIWULAN II TAHUN 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	83,96	87,96	104,76	Sangat Baik	
	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	50	70	140	Tidak Dapat Disimpulkan	
	Jumlah Desa Pangan Aman	45	70	155,56	Tidak Dapat Disimpulkan	
	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	55	80	145,45	Tidak Dapat Disimpulkan	

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Beberapa jenis Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: (a) KIE melalui media cetak dan elektronik; (b) KIE langsung ke masyarakat; dan (c) KIE melalui media sosial. Indeks Survei Tatap Muka 85,36 (total responden 110), dengan responden terbanyak ibu rumah tangga dan mahasiswa/pelajar (16,4%) dan Indeks Survei Media adalah 85,25 (total responden 170), dengan responden terbanyak perguruan tinggi (56,4%). Hasil survei menunjukkan materi yang paling banyak dibutuhkan responden adalah Informasi mengenai cara memilih dan konsumsi obat dan makanan yang aman, Penjelasan Berita/isu obat dan makanan yang beredar di masyarakat, dan Cara mendaftarkan produk Obat dan Makanan ke BPOM. Media yang banyak diakses responden adalah media sosial Instagram, Facebook, Youtube, dll. (55,9%)

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: (a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; (b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; (c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; (d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan

makanan. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan. Pengolahan data kuesioner KIE dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan Badan POM yang dilakukan setiap semester. Pengukuran indikator tersebut menggunakan indikator pembentuk indeks efektivitas KIE dengan 4 (empat) aspek KIE yang terdiri dari: (1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; (2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima; (3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan (4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

3.1.4.1 Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tabel 45 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	83,96	87,96	104,76	Sangat Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada Triwulan II Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT sebesar 83,96. Realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 87,96 dengan memperoleh persentase capaian sebesar 104,76% dan memperoleh kriteria **Sangat Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Apabila dibandingkan realisasi Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Triwulan II (87,96) terhadap realisasi Triwulan I (80,82), terjadi kenaikan. Persentase capaian Triwulan II naik sebesar 4,49% dibandingkan dengan Triwulan I.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT triwulan II tahun 2025 telah mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Melampaui**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 46 Perbandingan Realisasi “Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW 1 TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	83,96	85,31	101,6	Tercapai/ Melampaui	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Pada triwulan II tahun 2025, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 104,76 % (Sangat Baik), Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran sampai dengan triwulan II tahun 2025 disebabkan antara lain oleh:

1. KIE dilaksanakan secara *online* (daring) berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, dengan dengan topik Webinar Kesehatan dengan tema “Alternatif Pengganti Bahan Berbahaya pada Pangan” dan Sosialisasi Keamanan Pangan untuk siswa di Kota dan Kabupaten Bogor, dan Kota Depok.
2. KIE secara tatap muka (luring) antara lain Sosialisasi Keamanan Pangan "SAKA POM", Pelatihan Penjamah Makanan "Sosialisasi Keamanan Pangan" untuk petugas SPPG, Pelatihan Manajerial SPPI DI Kabupaten Bandung Barat dengan berbagai materi terkait Keamanan Pangan, KIE pada Jambore Kwartcab Pramuka Kabupaten Bogor, TOT Pelatih Pembina Pramuka dengan tema keracunan pangan, Sosialisasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Aman, serta Bimtek Proses Registrasi Pangan Olahan.
3. KIE memanfaatkan platform media sosial yang dimiliki oleh Balai POM di Bogor yaitu Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube.
4. KIE bersama Tokoh Masyarakat yang semakin memperkenalkan peran, tugas dan fungsi BPOM, dll.

Hasil penilaian efektifitas KIE tatap muka pada kegiatan diatas sebagai berikut:

- Sumber informasi/ Narasumber (86,7)
- Konten atau informasi (87,349)
- Pemahaman audiens (82,955)
- Manfaat (84,432)

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa indeks total efektifitas KIE adalah efektif. Peserta mendapatkan informasi/ materi yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta. Namun, perlu

adanya penyesuaian terkait pengemasan materi / bahan informasi dengan bahasa yang disesuaikan dengan audiens sehingga pemahaman audiens bisa meningkat. Serta dapat juga disesuaikan tema KIE terhadap peserta baik usia maupun gender, diantaranya materi mengenai kosmetik bisa diberikan ke remaja khususnya perempuan.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Pada triwulan II tahun 2025, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 104,76 % (Sangat Baik), program / kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kegiatan ini adalah:

1. KIE daring / Penyebaran Informasi Webinar Kesehatan dengan tema “Alternatif Pengganti Bahan Berbahaya pada Pangan”
2. KIE luring / Penyebaran Informasi Sosialisasi Keamanan Pangan "SAKA POM"
3. KIE luring / Penyebaran Informasi atas permintaan narasumber pada kegiatan Pelatihan Penjamah Makanan "Sosialisasi Keamanan Pangan" untuk petugas SPPG
4. KIE luring / Penyebaran Informasi atas permintaan narasumber pada kegiatan Pelatihan Manajerial SPPI Di Kabupaten Bandung Barat dan Cikeas, DKI Jakarta
5. KIE luring / Penyebaran Informasi atas permintaan narasumber pada kegiatan KIE pada Jambore Kwartir Pramuka Kabupaten Bogor dan kegiatan lainnya bersama Saka POM Kota Bogor
6. KIE luring / Penyebaran Informasi atas permintaan narasumber pada kegiatan KIE pada TOT Pelatih Pembina Pramuka dengan tema keracunan pangan
7. KIE luring / Penyebaran Informasi atas permintaan narasumber pada kegiatan KIE pada Bimtek Proses Registrasi Pangan Olahan
8. KIE luring / Penyebaran Informasi bersama Tokoh Masyarakat
9. Inovasi Menemani BPOM Bogor (Program Magang di BPOM Bogor)

Dalam upaya mencapai indikator kinerja efektifitas KIE Obat dan Makanan, masih terdapat kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan KIE, yaitu masih terbatasnya kelompok peserta yang dapat memahami materi KIE sehingga perlu membuat media atau bahan informasi yang lebih mudah untuk dipahami

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 47 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	101,6	50,14%	2,51	1,51	TIDAK EFISIEN

Berdasarkan tabel diatas, indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan kategori **Tidak Efisien** dengan tingkat efisiensi 1,51. Karena capaian realisasi anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan serapan yang masih rendah untuk KIE bersama Tokoh Masyarakat (27,77%), baru 3 titik yang terealisasi dari target 20 titik.

3.1.4.2 Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.

- A. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
- B. intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi.
- C. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:
 - 1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
 - 2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
 - 3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:

- 1. Jika Kab/Kota banyak,maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
- 2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

- D. Tahapan kegiatan sebagai berikut:
- a) Sekolah Full Intervensi:
 - 1. advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
 - 2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
 - 3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
 - 4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
 - 5. Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.
 - b) Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

Tabel 48 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan”
TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	50	70	140	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada Triwulan II Tahun 2025 *progress* target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sebesar 50. Realisasi *progress* target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 70 dengan memperoleh persentase capaian sebesar 140% dan memperoleh kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

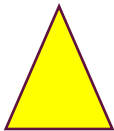
B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Apabila dibandingkan realisasi Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Triwulan II terhadap realisasi Triwulan I, terjadi kenaikan. Persentase capaian Triwulan II naik sebesar 90% dibandingkan dengan Triwulan I.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi indikator Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan triwulan II tahun 2025 belum mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Akan Tercapai**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 49 Perbandingan Realisasi “Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	70	70	Akan Tercapai	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Indikator kegiatan persentase jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan masih dalam kriteria tercapai/melampaui, karena target yang digunakan adalah target yang ditetapkan sebelum efisiensi. Sehingga perlu adanya penyesuaian target seperti yang telah disepakati dan ditetapkan oleh pusat, yaitu dari 50% menjadi 70%. Keberhasilan kinerja disebabkan komitmen dan komunikasi yang baik dari pihak sekolah, khususnya SMPN 11 Sukatani, sedangkan untuk komunikasi dengan SDN RRI masih terkendala.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Penetapan proporsi tahapan masih sebelum efisiensi dilakukan sehingga target masih masuk ke dalam kategori akan tercapai. Target 4 sekolah di akhir tahun bila anggaran tersedia, sedangkan yang Balai sanggup adalah 4 sekolah, yaitu SMPN 11 Sukatani dan SDN RRI Cisalak, Kota Depok. Realisasi 70% sesuai dengan target yang ditetapkan pusat, yaitu 70, sehingga capaian seharusnya 100%, bukan 145%.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 50 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya “Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	140	41,72	3,80	2,80	TIDAK EFISIEN

Berdasarkan tabel diatas, indikator Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan kategori **Tidak Efisien** dengan tingkat efisiensi 2,80. Karena capaian realisasi anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

3.1.4.3 Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan aksi nasional yang dilaksanakan untuk memberikan intervensi keamanan pangan ke desa/kelurahan dengan tahapan program sebagai berikut :

- 1. Advokasi Kelembagaan Desa
- 2. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa
- 3. Bimbingan Teknis (Bimtek) Komunitas
- 4. Fasilitasi Keamanan Pangan
- 5. Monitoring dan evaluasi

Program Desa/Kelurahan Pangan aman ini merupakan kedua kalinya dilakukan oleh BPOM di Bogor. Target Desa Pangan Aman tahun 2025 adalah 1 Desa/Kelurahan di Kota Depok. Seluruh tahapan intervensi program Desa Pangan Aman telah dilaksanakan mulai dari advokasi lintas sektor sampai dengan monitoring dan pelaporan.

Program Desa Pangan aman yang dilakukan oleh Balai POM di Bogor tergolong berhasil. Keberhasilan program ini diukur dengan terpenuhinya beberapa indikator yaitu:

- 1. Kader Keamanan Pangan Desa yang aktif
- 2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- 3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri Persentase progres capaian jumlah Desa Pangan Aman telah tercapai 100%

Tabel 51 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Jumlah Desa Pangan Aman” TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Jumlah Desa Pangan Aman	45	70	155,56	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada Triwulan II Tahun 2025 *progress* target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Jumlah Desa Pangan Aman sebesar 45. Realisasi *progress* target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 70 dengan memperoleh persentase capaian sebesar 155,56% dan memperoleh kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Hal ini karena target yang digunakan adalah target yang ditetapkan sebelum efisiensi, sehingga perlu adanya penyesuaian target seperti yang telah disepakati dan

ditetapkan oleh pusat, yaitu dari 45% menjadi 70%. Realisasi 70% sesuai dengan target yang ditetapkan pusat, yaitu 70, sehingga capaian seharusnya 100%, bukan 155,56%.

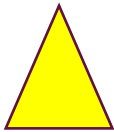
B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Apabila dibandingkan realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan II terhadap realisasi Triwulan I, terjadi kenaikan. Persentase capaian Triwulan II turun sebesar 115,56% dibandingkan dengan Triwulan I.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman triwulan II tahun 2025 telah mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Akan Tercapai**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 52 Perbandingan Realisasi “Jumlah Desa Pangan Aman” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Jumlah Desa Pangan Aman	100	80	80	Akan Tercapai	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Indikator kegiatan persentase jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan masih dalam kriteria akan tercapai. Ini dikarenakan Penetapan proporsi tahapan dipilih pada saat sebelum efisiensi dilakukan. Pada TW 2 sudah dilakukan 4 (empat) tahapan pada dan pelaporan sudah selesai pada aplikasi GKPD diantaranya yaitu Forum Advokasi Komitmen Pemda Lintas Sektor Pasar, Bimtek Kader Keamanan Pangan Kelurahan, Bimtek komunitas kelurahan, dan Fasilitasi Keamanan Pangan. Untuk kegiatan terakhir yaitu Pengawasan memang dijadwalkan pada TW 3 yaitu bulan Juli 2025.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Penetapan proporsi tahapan masih sebelum efisiensi dilakukan sehingga target masuk ke dalam kategori tercapai/melampaui. Kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah komitmen,

koordinasi, komunikasi dan peran aktif pihak Kelurahan Sukatani dan para kader. Petugas Balai juga hadir mendampingi saat fasilitasi keamanan pangan di sarana produksi komunitas.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 53 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Jumlah Desa Pangan Aman” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Jumlah Desa Pangan Aman	155,56	36,80	2,67	1,67	TIDAK EFISIEN

Berdasarkan tabel diatas, indikator Jumlah Desa Pangan Aman dengan kategori **Tidak Efisien** dengan tingkat efisiensi 1,67. Karena capaian realisasi anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja. Realisasi anggaran sebesar 36,80% karena beberapa kegiatan tidak ada anggaran khusus karena efisiensi.

3.1.4.4 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang di dalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari para pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar baik dari sisi *supply* maupun *demand*. Tahapan dalam program pasar aman berbasis komunitas ini antara lain adalah sebagai berikut:

- 1. Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar
- 2. Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar
- 3. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar
- 4. Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi
- 5. Pengawalan

Target jumlah pasar yang diintervensi oleh Balai POM di Bogor pada tahun 2025 sebanyak 1 pasar, yaitu Pasar Sukatani, Kota Depok. Indikator keberhasilan pasar pangan aman berbasis komunitas diukur dengan antara lain:

- 1. Pembentukan kader pasar yang mampu melakukan pengawasan mandiri terhadap bahan berbahaya maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya serta memberikan KIE kepada komunitas pasar

Tersedia data hasil sampling dan pengujian di pasar yang menjadi target intervensi sebagai pasar pangan aman berbasis komunitas dan tersedia di aplikasi Sipaman

Tabel 54 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas” TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	55	80	145,45	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada Triwulan II Tahun 2025 *progress* target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sebesar 55. Realisasi *progress* target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 80 dengan memperoleh persentase capaian sebesar 145,45% dan memperoleh kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Hal ini karena target yang digunakan adalah target yang ditetapkan sebelum efisiensi, sehingga perlu adanya penyesuaian target seperti yang telah disepakati dan ditetapkan oleh pusat, yaitu dari 55% menjadi 80%. Realisasi 80% sesuai dengan target yang ditetapkan pusat, yaitu 80, sehingga capaian seharusnya 100%, bukan 145,45%.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Apabila dibandingkan realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan II (80%) terhadap realisasi Triwulan I (10%), terjadi kenaikan. Persentase capaian Triwulan II naik sebesar 7% dibandingkan dengan Triwulan I.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas triwulan II tahun 2025 telah mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Tercapai/Melampaui**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 55 Perbandingan Realisasi “Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	100	80	80	Akan Tercapai	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Indikator kegiatan persentase jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan masih dalam kriteria akan tercapai. Ini dikarenakan Penetapan proporsi tahapan masih sebelum efisiensi dilakukan. Pada TW 2 sudah dilakukan 4 dari 5 tahapan pada Kegiatan PPABK namun baru 2 kegiatan yang secara pelaporan sudah selesai pada aplikasi Ssipaman diantaranya yaitu Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar dan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar. Sedangkan 2 (dua) kegiatan yaitu Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi kegiatannya sudah dilakukan namun pelaporannya masih berproses pada aplikasi Sipaman. Untuk kegiatan terakhir yaitu Pengawasan memang dijadwalkan pada TW 3 yaitu bulan Juli 2025.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Penetapan proporsi tahapan masih sebelum efisiensi dilakukan sehingga target masih masuk ke dalam kategori akan tercapai. Keberhasilan program ini didukung komitmen, koordinasi, komunikasi dan peran aktif pengelola Pasar Sukatani dan pedagang pasar. Beberapa kegiatan terealisasi tanpa ada anggaran khusus, seperti pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi kegiatan. Beberapa kendala antara lain kebutuhan bahan informasi cetak yang dapat digunakan pengelola pasar untuk memberikan sosialisasi ke pedagang pasar, dan pengujian dengan rapid kit untuk mengetahui kondisi keamanan pangan sebelum dan setelah diberikan intervensi.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 56 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	145,45	58,33	59,61	58,61	TIDAK EFISIEN

Berdasarkan tabel diatas, indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan kategori **Tidak Efisien** dengan tingkat efisiensi 58,61. Karena capaian realisasi anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

SASARAN KEGIATAN KE-5: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Tabel 57 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-5 TRIWULAN II TAHUN 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	40	41,67	104,18	Sangat Baik	

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB = (A + B + C)/3

A = Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB / Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan x 100%

B = jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap / Jumlah UMKM OBA yang didampingi pada tahun berjalan x 100%

C = Jumlah rekomendasi SPA CPKB / Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan x 100%

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi minimal sesuai target pada DIPA

A. Ruang Lingkup UMKM:

- 1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

- . Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:

- . UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

B. UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

C. Kriteria UMKM yang didampingi:

Untuk UMK Pangan Olahan :

- . UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
- . UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Untuk UMKM OBA:

- 1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
- 2) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
- 4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- 5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
- 6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

Untuk UMKM Kosmetik:

- 1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
- 2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
- 3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
- 4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

Tabel 58 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan” TRIWULAN II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	40	41,67	104,18	Sangat Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada Triwulan II Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan sebesar 40%. Realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 41,67% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 104,18% dan memperoleh kriteria **Sangat Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Apabila dibandingkan realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Triwulan II terhadap realisasi Triwulan I, terjadi kenaikan. Persentase capaian Triwulan II turun sebesar 45,83% dibandingkan dengan Triwulan I.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan triwulan I tahun 2025 belum mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Perlu Upaya Keras**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 59 Perbandingan Realisasi “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA,	91	41,67	45,79	Perlu Upaya Keras	

<i>Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>					
--	--	--	--	--	--

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Pada Triwulan II tahun 2025, persentase capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan telah memenuhi target. Target yang ditetapkan sebesar 40%, sedangkan persentase realisasi sebesar 41.67%. Hal ini disebabkan karena koordinasi dengan dinas UMK terkait telah berjalan di bulan April 2025. Pada bulan Mei 2025 telah dilaksanakan bimtek UMK untuk komoditi pangan olahan, obat tradisional dan kosmetik. Pelaksanaan Bimtek tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Balai POM di Bogor dengan OPD terkait yaitu Dinas Koperasi dan UMK kota Depok, BAPERRIDA kota Bogor, dan DPMPTSP Kabupaten Bogor. Selain itu pelaksanaan bimtek UMK Pangan olahan juga bekerjasama dengan program kegiatan orang tua asuh. Pada bulan Juni juga telah dilaksanakan beberapa pendampingan ke sarana UMK untuk melihat kesiapan sarana prasarana UMK yang telah menjadi target pendampingan tahun 2025.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada triwulan II ini adalah adanya kolaborasi antara Balai POM di Bogor dengan OPD terkait yaitu Dinas Koperasi dan UMK kota Depok, BAPERRIDA kota Bogor, dan DPMPTSP Kabupaten Bogor. Bersama OPD terkait, Balai POM di Bogor melakukan koordinasi untuk penyediaan tempat pelaksanaan dan anggaran konsumsi. UMK yang diundang merupakan UMK yang berasal dari Kota/Kabupaten Bogor, Kota Depok. Selain itu pelaksanaan bimtek UMK Pangan olahan sepama 2 hari juga bekerjasama dengan program kegiatan orang tua asuh dari Direktorat PMPU Pangan Olahan.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 60 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
<i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA,</i>	104,18	21,41	4,87	3,87	TIDAK EFISIEN

Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan					
---	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan kategori **Tidak Efisien** dengan tingkat efisiensi 3,87. Karena capaian realisasi anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

SASARAN KEGIATAN KE-6: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 indikator. Berdasarkan perhitungan indikator tersebut, diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 102,27% dengan kriteria pencapaian **Sangat Baik**. Rincian capaian kinerja sasaran kegiatan ke-6 triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah:

Tabel 61 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-6 TRIWULAN II TAHUN 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	55	56,25	102,27	Sangat Baik	

3.1.6.1 Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT

Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah perkara}) \times 100\%)$$

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan

4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$= ((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah target perkara}) \times 100\%$$

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.

Perkara dengan tersangka yang sudah ditetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan *hardcopy*

Tabel 62 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT” Triwulan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	55	56,25	102,27	Sangat Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada Triwulan II Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT sebesar 55%. Realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 56,25% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 102,27% dan memperoleh kriteria **Sangat Baik**.

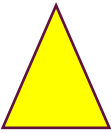
B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Apabila dibandingkan realisasi Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT Triwulan II terhadap realisasi Triwulan I, terjadi kenaikan. Persentase capaian Triwulan II turun sebesar 89,40% dibandingkan dengan Triwulan I.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT triwulan II tahun 2025 belum mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Akan Tercapai**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 63 Perbandingan Realisasi “Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	80	56,25	70,31	Akan Tercapai	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Tercapainya target pada TW 2 ini disebabkan petugas yang aktif dan pelaku usaha yang kooperatif serta kolaborasi dengan instansi lain saat bertugas.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain sangat berpengaruh terutama pada saat penindakan. Menyusun strategi untuk mengoptimalkan capaian di TW berikutnya dengan adanya relaksasi anggaran terkait penegakan hukum di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 64 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	102,27	8,23	12,43	11,43	TIDAK EFISIEN

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT dengan kategori **Tidak Efisien** dengan tingkat efisiensi 11,43. Karena capaian realisasi anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

SASARAN KEGIATAN KE-7: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Tabel 65 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-7 Triwulan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase	50	50	100	Baik	
	Laporan Analisis					
	Kejahatan					
	Sediaan Farmasi					
	dan Pangan					
	Olahan yang diselesaikan sesuai standar					

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
 - 1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (**1 laporan dilaporkan tiap tahun**).
 - 2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (**1**

laporan dilaporkan tiap tahun).

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%).

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada Triwulan II Tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar sebesar 50%. Realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 100% dan memperoleh kriteria **Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 sama dengan realisasi dan capaian pada triwulan I.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar triwulan II tahun 2025 belum berhasil mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria capaian **Perlu Upaya Keras**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah

Tabel 66 Perbandingan Realisasi “Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	55,56	Perlu Upaya Keras	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Hasil dari indikator ini didapatkan Perlu Upaya Keras dikarenakan pembobotan nilai yang dibuat berdasarkan DO sudah sesuai, dimana Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%).

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan serta Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 67 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya“Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100	54,02	1,85	0,85	EFISIEN

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan kategori **Efisien** dengan tingkat efisiensi 0,85.

SASARAN KEGIATAN KE-8 : Layanan Publik UPT yang prima

Tabel 68 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-8 Triwulan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,2	-	-	-	-

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%)

Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik:

75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Gambar 8 Kategori Nilai Indeks Pelayanan Publik

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada triwulan II tahun 2025 belum diperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik UPT. Nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2025.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Belum tersedia realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT pada triwulan II tahun 2025. Realisasi akan diperoleh pada akhir tahun 2025. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 69 Perbandingan Realisasi “Indeks Pelayanan Publik UPT” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,2	-	-	-	-

SASARAN KEGIATAN KE-9 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal

Tabel 70 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-9 TRIWULAN II TAHUN 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	77	-	-	-	-
	Nilai AKIP UPT	79,5	-	-	-	-
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	4	-	-	-	-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
	<i>Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM</i>	2,6	-	-	-	-

3.1.9.1 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

- 1) memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
- 2) menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self-assessment* dan reuiu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

Tabel 71 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM” TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN N SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	77	-	-	-	-

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada triwulan II tahun 2025 belum diperoleh Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM. Nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2025.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Belum tersedia realisasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM pada triwulan II tahun 2025. Realisasi akan diperoleh pada akhir tahun 2025. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 72 Perbandingan Realisasi “Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	77	-	-	-	-

3.1.9.2 Nilai AKIP UPT

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

- (1) Perencanaan Kinerja;

- (2) Pengukuran Kinerja;
- (3) Pelaporan Kinerja;
- (4) Evaluasi Kinerja Internal;
- (5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang.

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 73 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Nilai AKIP UPT” TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
<i>Nilai AKIP UPT</i>	79,5	-	-	-	-

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada triwulan II tahun 2025 belum diperoleh Nilai AKIP UPT. Nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2025.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Belum tersedia realisasi Nilai AKIP UPT pada triwulan II tahun 2025. Realisasi akan diperoleh pada akhir tahun 2025. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 74 Perbandingan Realisasi “Nilai AKIP UPT” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Nilai AKIP UPT	79,5	-	-	-	-

3.1.9.3 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran =
(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- 1. Revisi DIPA (bobot 10%)
- 2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
- 3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
- 4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
- 5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
- 6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
- 7. Capaian Output (bobot 25%)
- 8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

- 1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
- 2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Tabel 75 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM” TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN N SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	4	-	-	-	-

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada triwulan II tahun 2025 belum diperoleh Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM. Nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2025.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Belum tersedia realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM pada triwulan II tahun 2025. Realisasi akan diperoleh pada akhir tahun 2025. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 76 Perbandingan Realisasi “Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	4	-	-	-	-

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM akan diperoleh pada akhir tahun, namun setiap triwulan nilai NKA dapat dipantau pada aplikasi OMSPAN dan SMART DJA, nilai NKA TW II Balai POM di Bogor yairtu sebesar **80,59** , untuk nilai TW II masih berada pada skala 4 yaitu range 80,01-90 sesuai dengan target Balai POM di Bogor, keberhasilan tersebut dikarenakan untuk Nilai IKPA pada TW II selalu dilakukan monitoring IKPA setiap hari Senin, selain itu realisasi

capaian output sesuai dengan target yang telah ditetapkan. untuk Triwulan selanjutnya Balai POM di Bogor akan selalu memonitoring setiap indikator IKPA terutama Rencana Penarikan Dana dan Realisasi Capaian Output.

**E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA**

Keberhasilan nilai NKA Triwulan II pada Balai POM di Bogor dikarenakan selalu dilakukan rapat monitoring terhadap nilai Indikator IKPA terutama Rencana Penarikan dana dan Realisasi Capaian Output setiap hari Senin.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Karena masih berada dalam skala 4 sesuai dengan range target maka dapat disimpulkan penggunaan sumber yang terbatas bisa menjaga anggaran tetap efisien.

3.1.9.4 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Tabel 77 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM” TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN N SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	4	-	-	-	-

**A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN
II TAHUN 2025**

Pada triwulan II tahun 2025 belum diperoleh Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM. Nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2025.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025

Belum tersedia realisasi Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM pada triwulan II tahun 2025. Realisasi akan diperoleh pada akhir tahun 2025. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 78 Perbandingan Realisasi “Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM” triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2025		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	4	-	-	-	-

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Identifikasi resiko telah dilakukan namun untuk menggali akar permasalahan diperlukan langkah yang kompleks.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Untuk membangun kesadaran risiko pada setiap staf makan perlu diadakan kegiatan untuk meningkatkan taraf kesadaran dalam menjalankan suatu resiko.

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 79 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomen dasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeli ne	
1	Pengawas an dan Pengendal ian Produk	Pengawasan iklan pada media penyiaran / TV lokal susah ditemukan.	Melakukan koordinasi melalui pengiriman surat kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah tentang waktu tayang iklan dan meminta rekaman iklan yang ditayangka n oleh media penyiaran / TV lokal.	Minggu III April.	Telah mendapatkan jawaban dari KPID terkait waktu tayang iklan dan meminta rekaman iklan yang ditayangkan oleh media penyiaran / TV lokal		Minggu III April.	selesai
2	Meningkatn ya efektivitas pengawasa n Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Jumlah armada transportasi tidak cukup dan tidak memadai untuk melakukan pemeriksaan ke beberapa titik dengan akses lokasi yang sempit	Menambah armada transportasi dinas untuk disewa - Berkoordin asi dengan fungsi lain untuk dapat join kendaraan. - Mengguna kan jasa ojol.	1 bulan	Sewa kendaraan	-	April	Selesai
3	Meningkatn ya pendampin gan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Terdapat perubahan tahapan dan waktu untuk manual iku khusus Pangan	Akan melaksana kan penetapan target untuk pendampin gan UMK Pangan Olahan pada Maret 2025 melibatkan usulan stake holder	Juni 2025	Akan melakukan kunjungan koordinasi dengan dinas koperasi dan UMK Kota Depok		Juni	Selesai
		Pada saat sosialisasi IPCPPOB hanya diikuti sedikit pelaku usaha	Akan dilaksanak an sosialisasi kembali terkait IP CPPOB dan keamanan	Juli 2025	Pelaksanaaa n sosialisasi IP CPPOB		Juli 2025	Selesai

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomen dasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeli ne	
			pangan					
4	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1.Kegiatan KIE yang terbatas karena efisiensi anggaran 2.Bahan informasi yang terbatas, sisa anggaran th 2024 3.Aplikasi utk mengukur efektifitas KIE masih manual, masih pengembangan oleh Pusat dengan tools baru 4.Meningkatkan monev penyampaian informasi melalui media sosial dan subsite 5.Membagi jadwal KIE per triwulan 6.Meningkatkan kompetensi SDM	1.Pelaksanaan kie secara daring atau sharing cost 2.Pengajuan ke BBPOM di Bandung 3.done 4.done 5.done 6.Pelatihan	Juni 2025	1. Kolaborasi KIE dengan pemerintah daerah, seperti Dinas Kesehatan, Diskop UMK, DKP, dan Pramuka 2. KIE daring 3. KIE bersama Tokoh Masyarakat 4. Inovasi Menemani BPOM di Bogor 5. KIE Tematik Stunting 6. Bimtek Saka POM 7. Inovasi TOT Cepot	1. KIE Bersama Tokoh Masyarakat 2. KIE Tematik Stunting 3. Bimtek Saka POM 4. ToT Cepot	Desember 2025	Sedang proses
5	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Ketersediaan sampel verifikasi -> dimulai April 2025 saat inspeksi sarana pemerintah	Koordinasi	Juni 2025	1)Koordinasi terkait sampel verifikasi dengan Katim Pemeriksaan 2)dimulainya pembelian alat lab paling lambat s.d TW4		Juni 2025	Sedang proses
6	Nilai Pembangunan ZI UPT	Belum dilakukan input	Membuat lembar kerja LKe	April 2025	Melakukan proses penginputan LKE Zi dan		April 2025	Selesai

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomen dasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeli ne	
	Badan POM.				pembahasan s.d Triwulan II Tahun 2025 (bulan April 2025).			

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pada triwulan II tahun 2025 anggaran Balai POM di Bogor sebesar Rp9,925,362,000 (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp3,144,121,187 (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) sehingga persentase capaian realisasi sebesar 31,68%. Perincian alokasi anggaran dan realisasinya pada triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 80 RINCIAN REALISASI ANGGARAN BALAI POM DI BOGOR TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
1.	Belanja Pegawai	Rp 2,693,410,000	Rp 1,416,819,981	52.60
2.	Belanja Barang	Rp 4,781,669,000	Rp 1,727,301,206	36.12
3.	Belanja Modal	Rp 2,450,283,000	Rp 0	0
JUMLAH		Rp 9,925,362,000	Rp 3,144,121,187	31.68

Perbandingan komponen serapan anggaran pada triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 9 Rincian Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2025

BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai POM di Bogor Interim Triwulan II Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Balai POM di Bogor tahun 2025-2029 yang terdiri dari 10 sasaran strategis dengan 26 indikator kinerja utama. Dari 10 sasaran strategis, diperoleh 1 sasaran strategis memperoleh capaian “**Baik**”, 4 sasaran strategis memperoleh capaian “**Sangat Baik**”, 2 sasaran strategis dengan capaian “**Tidak Dapat Disimpulkan**”, dan 3 sasaran strategis baru dilakukan penilaian di akhir tahun.

Pernyataan pencapaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Pada triwulan II tahun 2025 Balai POM di Bogor berhasil Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Bogor dengan NPS sebesar 110,08% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.
2. Pada triwulan II tahun 2025 Balai POM di Bogor berhasil Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di wilayah kerja Balai POM di Bogor dengan NPS sebesar 200% dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”.
3. Pada triwulan II tahun 2025 Balai POM di Bogor berhasil Mewujudkan Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Bogor dengan NPS sebesar 117,14 % dengan kriteria “**Sangat Baik**”.
4. Pada triwulan II tahun 2025 Balai POM di Bogor berhasil Meningkatkan Efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Bogor dengan NPS sebesar 136,44% dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”.
5. Pada triwulan II tahun 2025 Balai POM di Bogor berhasil Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan NPS sebesar 104,18% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.
6. Pada triwulan II tahun 2025 Balai POM di Bogor berhasil mewujudkan Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Bogor dengan NPS sebesar 102,27% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.
7. Pada triwulan II tahun 2025 Balai POM di Bogor berhasil mewujudkan Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Bogor dengan NPS sebesar 100% dengan kriteria “**Baik**”.
8. Indikator Kinerja Layanan Publik UPT yang prima baru dilakukan penilaian di akhir tahun.
9. Indikator Kinerja Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal baru dilakukan penilaian di akhir tahun.
10. Indikator Kinerja Meningkatnya kepuasan masyarakat dan pelaku usaha pengguna layanan atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik BPOM baru dilakukan penilaian di akhir tahun.

Persentase capaian target sasaran strategis Balai POM di Bogor pada triwulan II tahun 2025 antara 100% sampai dengan 200%. Capaian sasaran strategis paling rendah diantara indikator lainnya yaitu pada indikator “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Bogor”. Sedangkan capaian sasaran strategis tertinggi daripada indikator lainnya yaitu pada indikator “Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di wilayah kerja Balai POM di Bogor” sebesar 200%.

Pada triwulan II tahun 2025, anggaran Balai POM di Bogor sebesar Rp.9,925,362,000 (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 3,144,121,187 (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) sehingga persentase capaian realisasi sebesar 31,68%.

4.2 SARAN

Untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan, maka Balai POM di Bogor perlu melakukan beberapa pendekatan/perbaikan, antara lain:

1. Koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai POM di Bogor (Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok) melalui pemantapan jaringan pengawasan Obat dan Makanan.
2. Melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka implementasi instruksi presiden no, 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, melalui peningkatan kualitas reviu perencanaan anggaran dan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan target kinerja sebagai tindak lanjut dari implementasi efisiensi anggaran Tahun 2025.
4. Peningkatan dan penguatan kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
5. Melakukan penyesuaian dalam metode pencapaian kinerja pengawasan, baik itu pre market, post market, penyidikan dan pemberdayaan masyarakat, dengan manual Indikator Kinerja Utama sesuai Rencana Strategis Tahun 2025-2029.
6. Melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan terus menerus serta berkesinambungan.

LAMPIRAN

1. RAPK TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI BOGOR
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JEFFETA PRADEKO PUTRA
Jabatan : Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor

JEFFETA PRADEKO PUTRA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

TARUNA IKRAR

Capaian RAPK

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Fisik					Anggaran		
				Target		Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
				Tahunan	TW II	TW II	Tahunan	TW II			
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Bogor	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	82,5	82,5	111,95	111,95	111,95	21.410.000	19.717.734	92.10
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	8,8	33,85	130,1	130,1	900.000	900.000	100
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	133,33	133,33	133,33	6.119.840	5.792.964	94.66
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	25.031.400	4.419.054	17.65
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	100	133,33	133,33	532.160	503.736	94.66

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Fisik					Anggaran		
				Target		Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
				Tahunan	TW II	TW II	Tahunan	TW II			
2	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor.	1	Persentase Keputusan / Rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder	88		40	48,05	105,68	61.954.200	13.257.162	21,40
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	1	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	75	75	77,49	103,32	103,32	61.954.200	13.257.162	21,40
		2	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65	-	96,30	148,15	148,15	61.954.200	13.257.162	21,40
		3	Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	90,5	-	108,88	120,22	120,22	101.067.000	22.095.270	21,86

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Fisik					Anggaran		
				Target		Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
				Tahunan	TW II		Tahunan	TW II			
		4	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan (Termasuk ~~PJRT~~) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	-	100,14	133,52	133,52	101.067.000	22.095.270	21.86
		5	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan.	82	82	99,55	121,2	121,2	27.560.000	6.434.000	23.35
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi.	1	Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	50	25	121,2	121,2	121,2	8.465.000	0	N/A
5	Menguatnya Laboratorium Pengawasan	1	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ~~UPT~~ sesuai	82	25	117,63	117,63	117,63	1.836.236.000	0	N/A

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Fisik					Anggaran		
				Target		Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
				Tahunan	TW II		Tahunan	TW II			
	n Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.		Standar ~~Kemampuan PT~~								
6	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di masing-masing wilayah kerja UPT.	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.	40	-	111,95	111,95	111,95	1.310.088.000	204.908.250	15.64
		2	Jumlah Sekolah Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) aman.	3	3	2	140	140	4.608.000	1.922.500	41.72
		3	Jumlah Desa Pangan Aman.	1	1	175	175	175	8.192.000	3.015.000	36.80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Fisik					Anggaran		
				Target		Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
				Tahunan	TW II	TW II	Tahunan	TW II			
		4	Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis komunitas.	1	1	145	145	145	1.200.000	700.000	58.33
7	Meningkatnya pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu.	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBAT BAHAN ALAM, Kosmetik yang	88,67	-	104,75	104,75	104,75	8.630.000	210.916	2.44
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.	94,60	-	125	125	125	218.924.000	46.876.200	21.41

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Fisik					Anggaran		
				Target		Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
				Tahunan	TW II	TW II	Tahunan	TW II			
	wilayah kerja UPT.										
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif.	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar.	75	-	100	100	100	1.470.000	121.000	8.23
10	Layanan Publik UPT yang Prima.	1	Indeks Pelayanan Publik UPT.	90.16	-	-	-	-	62.680.000	33.857.730	54.02
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal.	1	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) UPT Badan POM.	77	-	-	-	-	1.481.140.000	683.680.043	46.16
		2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT Badan POM.	99,85	-77	-	-	-	1.481.140.000	683.680.043	46.16

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Fisik					Anggaran		
				Target		Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
				Tahunan	TW II		Tahunan	TW II			
	I	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT Badan POM.	4	-	-	-	-	1.481.140.000	683.680.043	46.16
		4	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja.	2,6	-	-	-	-	1.481.140.000	683.680.044	46.16

*Anggaran berdasarkan DIPA terbaru dengan tambahan anggaran Belanja Barang (Penambahan Anggaran untuk Gaji PPNPN) sebesar 80.155.000, total anggaran sebesar 9.854.603.000



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	023	063	672846	BALAI POM DI BOGOR	Nilai	100.00	89.36	89.69	100.00	100.00	100.00	99.41	96.19	100%	0.00	96.19
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.40	17.94	10.00	10.00	10.00	24.85				
					Nilai Aspek	94.68		97.42				99.41				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 06

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	672846 BALAI POM DI BOGOR	PAGU REALISASI	2,693,410,000 1,416,819,981 (52.60%)	4,781,669,000 1,727,301,206 (36.12%)	2,450,283,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	9,925,362,000 3,144,121,187 (31.68%)
		SISA	1,276,590,019	3,054,367,794	2,450,283,000	0	0	0	0	0	0	6,781,240,813
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	2,693,410,000 1,416,819,981 (52.60%)	4,781,669,000 1,727,301,206 (36.12%)	2,450,283,000 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	9,925,362,000 3,144,121,187 (31.68%)
		SISA	1,276,590,019	3,054,367,794	2,450,283,000	0	0	0	0	0	0	6,781,240,813